PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM *ELECTRONIC VOTING* PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

(Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Filsafat Politik Islam

Oleh :

MOH. HAQIQIT TAUFIQ

NIM : E04213062

JURUSAN FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moh. Haqiqit Taufiq

NIM : E04213062

Jurusan : Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagiam-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2018

METERAI TEMPEL

7BD52AFF060119582

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Moh. Haqiqit Taufiq

E04213062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Moh. Haqiqit Taufiq* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 18 Juli 2018

Dosen Pembimbing,

M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP.198401052011011008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Moh. Haqiqit Taufiq* ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 07 Agustus 2018

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Plt. Dekan,

Dr. Suhermanto, M.Hum.
NIP.196708201995031001

Tim Penguji:

Ketua,

M. Pathoni Hakim, M.Si.
NIP.198401052011011008

Sekretaris,

Holilah, S.Ag, M.Si.
NIP.197610182008012008

Penguji I,

Zaky Ismail, M.Si.
NIP.198212302011011007

Penguji II,

Dr. HM. Ismail MH, M.Si.
NIP.196005211986081001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOH. Haqiqit Taufiq
NIM : E04213062
Fakultas/Jurusan : Filsafat Politik Islam
E-mail address : Haqiqit_taufiq@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Partisipasi masyarakat dalam electronic voting pada pemilihan kepala desa (studi kasus desa klantingsari, kecamatan tarik, kabupaten sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 . agustus 2018

Penulis

(MOH. HAQIQIT TAUFIQ)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul " Partisipasi Masyarakat dalam *Electronic Voting* pada pemilihan kepala desa (Study kasus desa klantingari kecamatan tarik kabupaten sidoarjo)" Dalam penelitian ini memunculkan dua rumusan masalah di antarannya: *pertama*, bagaimana partisipasi masyarakat dalam *Electronic Voting* dalam pemilihan kepala desa didesa klantingsari kecamatan tarik kabupaten sidoarjo?*kedua*bagaimana masyarakat merespon problem-problem yang terjadi dalam *Electronic Voting* dalam pemilihan kepala desa didesa klantingsari kecamatan tarik kabupaten sidoarjo?Riset yang berbasis pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif.

Temuan penulis terkait partisipasi masyarakat dalam *Electronic Voting* ini adalah mereka sangatlah antusias karena masyarakat penasaran terkait adanya pemilihan yang menggunakan sistem *Electronic Voting* namun mereka banyak yang kecewa karena masih banyaknya panitia-panitia yang tidak bersifat netral dalam waktu sosialisasi maupun pelaksanaan dalam pemilihan dan juga masih banyaknya panitia yang tidak faham tentang pengoperasian alat *Electronic Voting* itu sehingga mengakibatkan sistem error yang terjadi dan mengakibatkan problem-problem masyarakat.

Sedangkan problem yang terjadi dalam sistem *Electronic Voting* adalah banyaknya masyarakat yang tidak bisa menerima hasil dari pemilihan suara yang menggunakan alat *Electronic Voting* karena adanya suara yang selisih dari jumlah pemilih sama hasil pemilihan, yang mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di kantor kepala desa klantingsari dan teror kerumah-rumah warga yang menjabat jadi panitia pemilihan yang menggunakan sistem *Electronic Voting,* selain itu karena tetap merasa tidak puas masyarakat melaporkan ke pengadilan negeri sidoarjo dan melakukan demo kekantor bupati sidoarjo, yang kemudian di mediasi oleh DPRD sidoarjo.

Kata kunci : Partisipasi masyarakat, *Electronic Voting*, pemilihan kepala desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Kajian Pustaka 10
F. Definisi Konseptual 13
G. Metodelogi Penelitian 15
H. Teknik Pengumpulan Data 19
I. Teknik Analisis Data 22
J. Teknik Keabsahan Data 23
K. Sistematika Penelitian 25

BAB II : KERANGKA TEORI

A. Sistem *Electronic Voting* 30
B. Partisipasi Politik 38
C. Model dan Bentuk Partisipasi Politik 42
D. Faktor-faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi partisipasi politik ... 46
E. Landasan Partisipasi Politik 50
F. Konflik Sistem *Electronic Voting* 51
G. Teori Konflik 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Dialektika Konflik Kekuasaan 57
I. Bentuk-Bentuk Konflik 59
J. Resolusi Konflik 60

BAB III : SETTING PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Subjek Penelitian 64
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 64
2. Sejarah Desa Klantingsari 67
3. Keadaansosial 68
B. Gambaran Umum Penerapan Electronic Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo 72
1. Desa klantingari kecamatan tarik kabupaten Sidoarjo terpilih sebagai salah satu yang menggunakan sistem *electronic voting* 73
2. Proses *Electronic Voting* di Desa Klantingsari 76
3. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang Menggunakan *Electronic Voting* di Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo 77

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Implementasi *Electonic Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa, di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo..... 80
B. Partisipasi Masyarakat Dalam *Electonic Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa 86
C. Kendala yang terjadi dalam sistem *electronic voting*pada pemilihan kepala desa. Didesa klantingsari kecamatan tarik 101

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....199
B. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Klantingsari Tahun 2017 65

B. Tabel 3.2 Jumlah Pemilih Penduduk Desa Klantingsari tahun 2018.....66

C. Tabel 3.3 Jumlah DPT Penduduk Desa Klantingsari tahun 2018 66

D. Tabel 3.4 Kalkulasi jumlah DPT dengan Jumlah pemilih..... 66

E. Tabel 3.5 Aspek Pendidikan Desa Klantingsari tahun 2018..... 69

F. Tabel 3.6 Aspek ekonomi di Desa Klantingsari Tahun 2018 70

G. Tabel 3.7 Jumlah masjid dan musholah di Desa Klantingsari tahun 2018..71

H. Tabel 3.8 Batas wilayah kabupaten sidoarjo Tahun 2018..... 73

I. Tabel 3.9 Susunan panitia *Electronic Voting*..... 77

J. Tabel 4.1 Pemilihan umum sistem *Electronic Voting* tahun 2018 87

K. Tabel 4.2 Pemilihan umum sistem manual tahun 2013..... 88

L. Tabel 4.3 Pendidikan desa klantingsari 93

M. Tabel 4.4 Relevansi dengan teori partisipasi politik menurut samuel P. Huntington..... 99

DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 3.1 proses *eletronic voting*..... 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Terdapat kolerasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpuk pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Kolerasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional, sebagaimana yang disebutkan dalam teori konstitusi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis Suseno, "demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya".[1]

Konsep demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat karenanya salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi.[2]Bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaandalam pemilihan umum. Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan seseorangatau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik.Anggota masyarakat yang berpartisipasidalam proses politik,

[1] Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indinesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 160

[2]Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya dalam pemilihan umum, melakukan tindakannya didorongoleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalurkan atausekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhitindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

Pada tangal 25 maret 2018 di jawa timur ada pemilihan kepala desa serentak diantaranya adalah di Kabupaten Sidoarjo ada 70 desa yang mengikuti pilkades serentak ini dari 17 Kecamatan dan 14 desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting* dan 56 desa yang mengunakan manual. Dan desa Klantingsari termasuk terpilih menggunakan pemilihan kepala desa dengan sistem *Electronic Voting* ini adalah suatu apresiasi yang sangat luar biasa untuk desa Klantingsari karena dari 70 desa yang mengikuti pelaksanaan pilkades serentak yang diantaranya 56 desa yang masih menggunakan sitem manual desa Klantingsari terpilih untuk mencoba sistem *Electronic Voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pengadaan peralatan pendukung sebagaimana spesifikasi yang disarankan oleh BPPT diadakan oleh bidang Pemerintahan Desa sebanyak 23 Unit.Selanjutnya BPPT membantu penyiapan aplikasinya serta manajemen keamanan yang disesuaikan dengan perangkat yang digunakan.

Pemilihan kepala desa konon dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata di Desa, dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* (satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang satu suara).[3] Pemilihan Kepala Desa merupakan sesuatu hal lazim yang dilaksanakan ditiap-tiap desa, merupakan sesuatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala Desa adalah pemimpin desa di Indonesia dan di Desa Klantingsari ada 2 kandidat calon Kepala Desa diantaranya adalah Bapak Wawan Setyo Budi Dan Bapak Suherno Widianto.

Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masajabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masajabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Namun pada saat ini pemilihan Kepala desa yang dilaksanakan adalah jauh berbeda yang dulunya memakai sistem coblos tetapi saat ini memakai sistem *Electronic Voting* pemerintah indonesia membuat trobosan baru yaitu dengan menggunakan sistem *Electonic Voting* yaitu suatu pengumpulan data dengan menggunakan perangkat elektronik, hal ini bertujuan untuk menciptakan pemilihan yang lebih transparan, lebih cepat dan hemat biaya.

Darisini tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa yang menggunakan *Electronic Voting* harus berjalan dengan sesuai untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan pemerintahanyang demokratis, namun demikian rendahnya partisipasi pemilih menjadi gejala umumdalam pemilihan Kepala Desa di banyak wilayah dan kemungkinan partisipasi pemilih ini juga akan menjadi gejala umum pemilu Indonesia di masamendatang, Pemahaman mereka tentang demokrasi pada

[3]Ofilus Kuhon, *"partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa (suatu studi di desa toenselama kecamatan tondano utara)"* Peneliti Desa Mahasiswa Program Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013, 02.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya adalah masyarakat dapat ikutmenentukan siapa yang memimpin mereka melalui pemilihan umum.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terlepas dari masalah yang tentu saja akan menjadi kendala. Hal tersebut juga terlihat pada pemilihan umum kepala desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo yang menggunankan sistem baru yaitu dengan menggunakan sistem *Electronic Voting.* kendala yang sering muncul misalnya proses pemilihan yang rumit dan selain itu kurangnya sosialisasi dari KPUD untuk menerangkan tata cara pemberian suara. Yang dulunya mencoblos kemudian diganti dengan cara menyentuh dalam *touchscreen*, pada pemilu kepala desayang bertujuan menghasilkan pemilihan umum yang lebih transparan, cepat, hemat biaya dan agar dapat menjamin adanya kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini hanya bisa dicapai apabila pemilihan umum itu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam pelaksanaan Pemilu kepala desa ini diharapkan masyarakat dapat memberikan partisipasi politik secara positif. Partisipasi politik melalui kegiatan pemilihan umum kepala desa yang didasarkan pada demokrasi karena keberhasilan pembangunan tidak hanya semata-mata tergantung pada usaha pemerintah saja tetapi harus adanya dukungan partisipasiseluruh masyarakat terutama dalam memberikan suara dalam pemilihan umum kepala desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Electronic Voting yaitu suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik.[4]Namun aspek kelemahan *Electronic Voting* yang menjadi pertimbangan yakni belum adanya standar dan sertifikasi yang disepakati untuk sistem *Electronic Voting*, adanya kemungkinan manipulasi hasil suara yang dilakukan oleh orang dalam yang mempunyai akses ke dalam sistem maupun peretas dari luar juga bisa saja terjadi dalam sistem yang melakukan autentikasi pemilih, berpotensi melanggar kerahasiaan pemilihan karena bisa terlihat di dalam sistem dari beberapa kelemahan-kelemahan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem *Electronic Voting*.

Dari beberapa aspek di atas, memang seharusnya dilakukan percobaan terlebih dahulu metode mana yang terjamin keamanannya. Percobaan tersebut bisa dilakukan pada pemilihan yang akan datang di suatu daerah yang sekiranya sudah bisa dilakukan sistem *Electronic Voting* dari situ akan terlihat hasilnya, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, seberapa banyak persentase kecurangan yang terjadi, sehingga bisa langsung dievaluasi.

Penerapan *Electronic Voting* berlangsung pada saat Pilkades serentak di Jawa timur, yang khususnya di Sidoarjo, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan uji coba dengan verifikasi pemilih menggunakan E-KTP di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo Masyarakat cukup membawa E-KTP sebagai alat verifikasi pemilih lalu mendapatkan kartu token. Kartu token untuk mengaktifkan "kertas suara" di bilik suara. Pemilih

[4]Ardiyanti.H, "*UjiCoba E-VerivikasidanMasaDepanPemiluElektronik 2019*", Jurnal, Vol.8No.15 (Agustus, 2016), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup menggunakan jari pada layar sentuh, tanpa perlu mencari paku untuk mencoblos.[5]Alat yang dikembangkan BPPT ini bisa disebut masih semi*Electronic Voting*, karena alat tak terkoneksi dengan internet saat pengambilan suara. Proses koneksi dengan internet baru akan terjadi ketika akan mengirim data ke pusat data KPU, dengan modem dari lokasi TPS.

Hal ini bisa dilihat dari Pelaksanaan pilkades serentak disidoarjo khususnya yang dilakukan secara sistem*Electronic Voting* perlu banyak pembenahan dalam pengkajian ulang seperti yang terjadi pada studi kasus di Desa KlantingsariKecamatan Tari Kabupaten Sidoarjo, pada saat sosialisasi masyarakat di DesaKlantingsari hanya diberi modul yang hanya berupa pemutaran video tutorial dilayar lebar yang dipraktikan pada pemilihan sistem *Electronic Voting*.[6]dengan ini mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat Desa Klantingsari belum bisa maksimal, kebanyakan mereka yang dikalangan yang tidak relatif muda tidak mengikuti atau tidak menggunakan hak pilih mereka karena ketidak pahaman dalam sistem *Electronic Voting* itu sendiri.

Kemudian, permasalahan yang muncul dari hasil pemungutan suara tidak sesuai dengan data pemilih yang hadir ketempat pemungutan suara. Sedangkan yang terjadi dilapangan alat sering mati sedangkan tim *IT* sendiri tidak bisa berbuat banyak, hal ini yang memicu kemarahan warga karena warga menduga ada permainan data, akibat kejadian ini sangat merugikan salah satu calon Kepala

[5]An nisa anabillah, Tokoh perempuan, *Wawancara*, Sidoarjo, 19 april 2018
[6]Dimas Yemanhura, masyarakat, *Wawancara*, Sidoarjo, 08 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa sehingga dari saksi tidak mau menerima dan masyarakat minta diadakan pelaksanaan kembali pilkades secara manual.[7]

Berbagai kecenderungan proses dan hasil pada sistem *Electronic Voting* pada pemilihan kepala desa tetap merupakan bahan kajian yang menarik. Kecenderungan proses pemelihan panitia dalam melaksanakan pemilihan umum pada kepala desa adalah salah satu fenomena paling menarik dibalik penyelenggraan pilkades. Berbagai konflik yang terjadi pada saat pilkades yang menggunakan sistem *Elecronic Voting* di Desa KlantingsariKecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang muncul dari hal sebagai berikut :

Pertama, ketidak tahuan warga dalam sistem *Electronic Voting* karena waga desa Klantingsari masih banyak yang lanjut usia karena bagi mereka adalah hal yang sangat baru untuk dipakai apalagi sampai diterapkann dalam sistem pemilihan, jangankan untuk memegang komputer memegang *handphone* saja mereka tidak bisa, dari hal ini sehingga mengakibatkan keikut sertaan panitia untuk mengintruksi si pemilih dalam bilik suara, hal ini sangat menjadikan asas pemilihan yang tidak luberjurdil yaitu langsung bebas rahasia jujur dan adil.[8]

Kedua,masih banyaknya panitia yang tidak mengetahui apa itu sistem *Electronic Voting* hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan pemilihan kepala desa kemarin mereka tidak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat pemilihan yang berlangsung karena pada saat pemilihan masih sering terjadi gangguan sistem yang mengakibatkat eror dalam komputer sehingga mengakibatkan ketidak cocokan antara jumlah yang memilih sama jumlah hasil

[7]Moh. Nanang, Masyarakat,*Wawancara*, Sidoarjo, 31 maret 2018
[8]Wisnu, Tokoh Pemuda, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 april 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan itu tidak sama selisih mencapai 36 suara yang disebut suara hantu dalam KPU.[9]

Mengetahui itu saksi yang dari pihak yang kalah meminta kepada panitia untuk penghitungan suara ulang dengan menghitung slip tanda bukti memilih yang dimasukkan pada bilik suara. Namun panitia sendiri tidak menyetujui hal tersebut. Dari situ tingkat kemarahan warga mulai memuncak, warga melakukan demonstrasi kepada panitia dan jajaran pemerintahan desa untuk mempertanggungjawabkan hasil pemilihan suara yang tidak sesuai tersebut.[10]

Sejalan dengan hal di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Partisipasi masyarakat dalam penggunaan*Electronic Voting* yang dilakukan pada pilkades serentak pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 diwilayah Sidoarjo. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini, akan dituangkan dalam proposal dan peneliti tertarik untuk meneliti tentang "*PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ELECTRONIC VOTING PADA PEMILIHAN KEPALA DESA* (Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)".Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam *Electronic Voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo dan Menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi problem-problem dalam sistem *Electronic Voting* di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

---

[9]An nisa anabillah, Tokoh Perempuan,*Wawancara*, Sidoarjo, 19 april 2018
[10]Wisnu, *Wawancara*, Tokoh Pemuda, Sidoarjo, 20 april 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi sistem *Electronic Voting* pada pemilihan kepala desa, di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimanapartisipasi masyarakat dalam*Electronic Voting* pada pemilihan Kepala Desa, di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo?
3. Apa saja yang menjadi kendala dalam*Electronic Voting* pada pemilihan Kepela Desa, di Desa Klantingsari, Kecamatan tarik, kabupaten sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini untuk :

1. Menjelaskan implemenasi sistem *Electronic Voting* pada pemilihan kepala desa.
2. Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam *Electronic Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.
3. Menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi problem-problem dalam sistem *Electronic Voting* di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Akademik

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dari penelitian yang telah dilakukan dengan mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai partisipasi masyarakat terhadap penerapan*Electronic Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi aparat pemerintahan di Kantor Desa Klantingsari agar lebih maksimal dalam menerapkan dan mengembangkan*Electronic Voting* Kantor Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

3. Teknis

Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan dalam bidang Ilmu Administrasi khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam penerapan *Electronic Voting*.

E. Kajian Pustaka

Ada tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, Pertama Dalam Jurnal yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC VOTING* (*ELECTRONIC VOTING*) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2013" yang ditulis oleh Satya Mahardika, Universitas Diponegoro, Fakultas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Semarang.[11]Hasil penelitian disini menujukan bahwa implementasi *Electronic Voting* telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah yang juga didukung oleh masyarakat desa.

Masyarakat merasa puas dengan digunakannya metode *Electronic Voting* dalam sebuah pemiliha implementasi *Electronic Voting* di Kabupaten Boyolali juga mencapai tujuan, yaitu mengurangi kesalahan yang terjadi dalam sebuah pemilihan, terutama dalam penghitungan suara.Selain itu dukungan sumber daya juga mempunyai peran penting dalam pelaksaan dalam sebuah progam. Komunikasi yang terjalin antara panitia Kabupaten, panitia Desa, dan juga masyarakat terlihat berhasil dengan puasnya masyarakat terhadap penggunaan metode *Electronic Voting* ini.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik tidak begitu berpengaruh dalam implementasi *Electronic Voting*, karena masyarakat merasa bahwa penggunaan metode *Electronic Voting*dalam sebuah pemilihan sudah layak diterapkan di Indonesia agar tidak ketinggalan zaman.

Kedua Dalam Jurnal yang berjudul *"RANCANG BANGUN SISTEM PILKADES MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SMART CARD SEBAGAI KARTU PEMILIH"* yang ditulis oleh Putu Indra Permana, Ketut Gede Darma Putra, Gusti Made Arya Sasmita, Universitas Udayana, Fakultas Teknik, Bali.[12]

---

[11]SatyaMahardika,"*ImplementasiKebijakanElectronic Voting (E-Voting) DalamPemilihanKepalaDesa di KabupatenBoyolali",Jurnal Politic and Government Studies,*Vol.6No.2Juni, 2017, 52-54.

[12]Indra, P dkk,"*RancangBangunSistemPilkadesMenggunakanTeknologi Smart Card SebagaiKartuPemilih",* JurnalLontarKomputer, Vol.7 No.2 Agustus, 2016, 756.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini menjelaskan pemilihan secara *Electronic Voting* memiliki banyak keunggulan, yaitu dapat menghemat waktu dan tenaga sumber daya terutama dalam proses penghitungan suara. Waktu pemilih melakukan *Voting* Pilkades lebih cepat dan hemat tenaga sumber daya karena aplikasi sistemsudah dirancang untuk mendapatkan langsung hasil *Voting* yang lebih cepat dan akurat.

Penelitian ini juga berhasil menerapkan sistem *Electronic Voting* Pilkades yang terdiri dari sistem pendaftaran pemilih, verifikasi data pemilih, verivikasi data pemilih dengan smart card, absensi data pemilih, proses *Electronic Voting* Pilkades dan *Dashboard* hasil *Voting* dengan menampilkan jumlah *Voting* dalam bentuk angka, persen (%), grafik dan diagram.

Ketiga Dalam Skripsi yang berjudul *"RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMILIHAN KEPALA DESA BERBASIS WEB (E-PILKADES)"* yang ditulis oleh Heru Setiyawan, Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia, Fakultas Teknik, Kediri.[13] Peneliti disini menjelaskan tentang penerapan sistem E-Pilkades ini memberikan tingkat keefektivan yang cukup tinggi, efisiensi biaya, dan penghitungan suara yang cepat karena penghitungan dilaksanakan secara terkomputerisasi.

Pada penerapannya dilapangan beberapa masyarakat mengalami kesulitan utamanya bagi masyarakat awam dengan teknologi, namun hal ini dapat diantisipasi dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif

[13]Heru Setiyawan,"*RancangBangunSistemInformasiPemilihanKepalaDesaBerbasis Web (E-Pilkades)*" (Skripsi, FakultasTeknikUniversitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada masyarakat.Sistem Elektronik Pilkades ini mampu memastikan jika pemilihadalah valid ataubenar-benarmemiliki hak pilih danmenghindarkan dari pemilih gandakarena sistem ini menerapkansistem verifikasi dengan mesin *fingerprint*.

F. Definisi Konseptual

1. Partisipasi

Merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi juga merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.[14]

2. Masyarakat

Sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. merupakan

[14]Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007),141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia, masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.[15]

3. *Electronic Voting*

Suatu pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari *Electronic Voting*adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan *Electronic Voting*penghitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya percetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk Pemilu dan Pilkada.[16]

4. Pemilihan Kepala Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, pemlihan kepala desa bersifat, umum, bebas, terbuka, jujur dan adil yang dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, badan permusyawaratan desa

[15]Prof. Dr. Selo Soemardjan, *Masyarakat dan Kebudayaan* , (Djambatan: Penerbit, 1998), 8.

[16]Sulastri, Leni Natalia Zulita, "*E-VottingPemilihanWalikota Bengkulu di KomisiPemilihanUmum (KPU) Kota Bengkulu*",Jurnal Media Infotama, Vol.11 No. 2 (September, 2015), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(BPD) membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.[17]

G. Metedologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu. Ini berarti untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian haruslah berlandaskan keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Maka dari itu, untuk mendapatkan dan menggunaan data yang valid dalam penelitian maka, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan metode yang akan digunakan dalam memperoleh data.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM *ELECTRONIC VOTING* PADA PEMILIHAN KEPALA DESA : Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo" maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara bahasa kualitatif berarti meninjau berdasarkan mutu.

Banister Et Al mendeskripsikan metode penelitian kualitatif, sebagaimana yang dikutip oleh Haris Hardiansyah, bahwa : "Inti dari penelitian Kualitatif adalah sebagai suatu metode untuk mengetahui atau

[17]Fatkhan Masruri, *"pemilihan kepala desa di kecamatan buluspesantren kabupaten kebumen ditinjau dari pasal 46 ayat (2) PP. NO. 72*, Skripsi, (skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dan tepat mengenai masalah yang dihadapi. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana partisipasi masyarakat dalam penggunaan maupun penerapan *Electronic Voting* di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti, serta menjelaskan data secara sistematis, dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti,[18] yaitu tentang Partisipasi Masyarakat dalam *Electronic Voting* di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini bertempat di wilayah Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Klantingsari dengan alasan pertama karena di desa tersebut memakai pemilihan *Electronic Voting* dalam pemilihan kepala desa, dan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Klantingsari dalam menggunakan pilihan sistem *Electronic Voting* dan juga pada saat pemilihan pemula memakai sistem *Electronic Voting* masih terjadi

[18]Haris Herdiansyah. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanipulasian data sehingga mengakibatkan ada pihak yang tidak setuju dengan hasil pemilihan sistem *Electronic Voting*.

3. Penentuan Informan

Dalam penentuan narasumber berdasarkan prosedur penentuan narasumber *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Dimana merupakan salah satu strategi menentukan narasumber dengan menentukan kelompok peserta yang menjadi narasumber sesuai dengan kriteria yang dipilih dan revelan dengan masalah yang ditelititentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam *Electronic Voting* meliputi:

1. Perangkat Desa, di Desa Klantingsari
2. BPD, di Desa Klantingsari
3. Tokoh Masyarakat, Tokoh Petani, Agama dll
4. TokohPerempuandi Desa Klantingsari
5. TokohPemuda di Desa Klantingsari
6. Masyarakat Desa Klantingsari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh data yang jelas dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari informasi yang mengarah kepada penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus bisa berperan sebagai instrumen penelitian, disamping juga bantuan dari pihak yang benar-benar mengetahui tentang pelaksanaan *Electronic Voting* pada pemilihan Kepala Desa, di Desa Klantingsari. Untuk itu, jenis dan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Jenis Data

1) Data Primer.

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data pertama di lapangan atau sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Data primer ini, diperoleh dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan yang disajikan melalui wawancara secara langsung. Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

2) Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh ke dua setelah data primer. Tidak menutup kemungkinan peneliti sulit atau tidak mendapatkan data dari sumber primer dikarenakan ada sesuatu hal yang sifatnya sangat pribadi. Oleh karena itu, peneliti juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan data sekunder sebagai sarana memperoleh data. Sumber data sekunder digunakan sebagai bahan pembanding dari data primer yang telah diperoleh.[19] Data sekunder yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data atau dokumen yang ada kaitannya dalam penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah:

1) Informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang semua hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
2) Dokumen, yaitu berupa tulisan atau catatan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui data Efektivitas Sistem *Electronic Voting* pemilihan Kepala Desa.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitiannya adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang

[19]Burhan Bungin,*Metodologi Penelitian Sosial* (Airlangga University Surabaya: Press, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Metode Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang jauh dapat diobservasi dengan jelas.[20] Sanafiah faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpastisipasi, observasi yang secara terang-terangan atau tersamar dan observasi yang tak berstruktur.

b. Metode wawancara

Burhan Bungin berpendapat bahwa, "Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber atau informan."[21] Senada dengan itu, Stewart dan Cash mendefinisikan wawancara lebih terperinci, sebagaimana yang dikutip oleh Haris Herdiyansyah, sebagai berikut:

> *"Wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan/memulai pembicaraan sementara yang lain hanya*

[20]Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D cetakan XXI* (Bandung: Alfabet, 2014), 226.

[21]Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *mendengarkan, akan tetapi adanya interaksi yang berkesinambungan antara pewawancara dan informan".*[22]

Wawancara merupakan metode yang digunakan oleh peneliti dalam penggalian data, dengan cara menanyakan langsung kepada informan. Wawancara dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan spontan atau menggunakan pedoman wawancara kemudian peneliti merekam atau mencatat hasil dari wawancara. Adapun informan yang dipilih oleh peneliti diantaralain adalah perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan masyarakat didesa klantingsari.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan cenderung menjadi data sekunder. Pemakaian metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, ilmiah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya.

Setelah peneliti melakukan pengamatan dokumentasi, lalu melihat data dokumentasi kepada Kepala Desa dan orang yang benar-benar mengetahui dalam sistem *Electronic Voting*. Metode dokumentasi, akan mendukung hasil penelitian dengan metode wawancara. Sehingga, hasil penelitian lebih terpercaya. Tetapi,

[22]Haris Herdiyansyah, *Metodologi penelitian kualitatif* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti perlu mencermati dari dokumentasi, karena tidak semua dokumentasi memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.[23]

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Moelong mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan oleh data.[24]

Penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga hal utama/alur kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga selesai, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, pemusatan, perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan *(field note*). Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

[23]Ibid., 22.
[24]Noeng Muhjair, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian menyeleksi setiap data yang didapatkan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dan sedang dilakukan. Dengan demikian, proses reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan penarikan kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya, setelah proses reduksi selesai dilakukan, peneliti menyajikan data secara terstruktur.

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Peneliti menginterpretasi data yang telah tersaji, kemudian merumuskan pola dan tema, melihat data dan mencoba mereduksinya kembali, sehingga proses ini merupakan proses yang interaktif.

J. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, menjaga keabsahan data yang diperoleh merupakan faktor utama. Maka dalam melakukan keabsahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data peneliti perlu memeriksa data kembali sebelum diproses dalam bentuk laporan yang disajikan. Agar tidak terjadi kesalahan, maka peneliti melakukan uji kredibilitas data. Menurut Sugiyono, dalam uji kredibilitas data terdapat empat macam cara, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi dan member check. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan metode triangulasi dalam melakukan teknik keabsahan data.[25]

A. Triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik, dan sumber data yang telah diperoleh. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan, triangulasi sumber berarti peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.[26]

Peneliti menggabungkan semua hasil penelitian, dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan kata lain, triangulasi merupakan menguji keabsahan dari hasil penelitian dengan peneliti, metode, teori, dan sumber data.[27]Jika sudah dipastikan triangulasi memiliki hasil yang sama dari awal hingga akhir, maka data yang diperoleh dianggap kredibel.

---

[25] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), 27.
[26] Ibid., 83.
[27] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap triangulasi data sebagai berikut:

1) Peneliti melakukan pengecekan tentang hasil dari pengamatan wawancara, maupun hasil data yang diperoleh dengan cara observasi dan dokumentasi.
2) Peneliti meneliti apa yang dikatakan informan tentang elit nelayan melakukan dominasipada masyarakat dan problem dominasi elit nelayan terkait penambangan pasir laut secara umum dengan mengecek data yang sudah ada apakah sesuai atau tidak.
3) Membandingkan pendapat atau perspektif informan satu dengan informan yang lain.
4) Membandingkan wawancara dengan isi dokumen.

Dengan demikian data yang dikumpulkan peneliti dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya.

K. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan runtutan dan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan skripsi. Agar lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan antara lain:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui secara jelas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II : Kerangka Teori

Pada bab ini Penulis akan mengeksplorasi kerangka teori mengenai pemilihan umum, Partisipasi Politik yang digunakan sebagai landasan konseptual guna menjawab pertanyaan penelitian yang penulis angkat

Bab III : Setting Penelitian

Pada bab ini membahas setting penelitian yang berisi deskripsi umum lokasi penelitian.

Bab IV: Pembahasan dan Analisis Data

Pada bab ini menjelaskan mengenai pembahasan dan analisis data tentang "**Partisipasi Masyarakat Dalam *Electronic Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.**

Bab V : Penutup.

Pada bab ini berisi penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan serta rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORI

Sehubungan dengan tema penelitian yaitu tentang "Partisipasi Masyarakat Dalam *Electronic Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa(Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)", dalam bab ini peneliti ingin menjelaskan mengenai kerangka konseptual dan kajian teori yang berhubungan dengan penelitian. Konsep tersebut nantinya dapat digunakan untuk menganalisa data yang ditemukan. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang beberapa pendekatan teoritis yang nantinya akan menunjang proses analisis data.

Electronic Voting merupakan sebuah perangkat pemberian suara secara elektronik, sehingga memiliki kemampuan untuk mempercepat tabulasi data, menekan biaya pemilihan dan memiliki kontribusi untuk mencegah pemilih yang tidak berhak.

Karena *Electronic Voting* ini merupakan suatu trobosan dalam proses pemilihan kepala desa, dimana pemilihan kepala desa inimerupakan proses pemilihan umum yang sangat begitu dialektis di lingkup masyarakat, sehingga adanya trobosan *Electronic Voting* ini bertujuan untuk mempermudah, meminimalisir kecurangan dan juga menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat. Maka dari itu peneliti menggunakan teori partisipasi politik Samuel P. Huntington, dimana Samuel P. Huntington ini melihat partisipasi masyarakat itu dari sudut pandang yang berbeda karena partisipasi politik ini bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyeluruh.Samuel P. Huntington juga mengkategorikan tipikal partisipasi masyarakat menjadi beberapa golongan diantaranya individual atau kolektif, terorganisir atau spontan secara damai atau dengan kekerasaan efektif atau tidak efektif.Sehingga teori ini saya pakai karena tipikal masyarakat desa Klantingsari ini adalah bersifat individual dan kolektif.Dimana individu dalam melakukan kegiatannya atas dasar rasa tanggung jawab dalam kehidupan politik.Merupakan ciri-ciri masyarakat dengan partisipasi memilih.Sedangkan partisipasi kolektif adalah kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh sejumlah orang atau banyak orang.yang sesuai diungkapkan oleh Samuel P. Huntington.

Selanjutnya peneliti menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf yang dipaparkan oleh Novri Susan.Peneliti menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf untuk menganalisis tentang permasalahan yang terjadi atas penggunaan sistem *Electronic Voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Karena teori ini di anggap relevan dengan permasalahan tersebut dimana dalam suatu masyarakat itu selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan-pertentangan yang terjadi secara terus menerus. kekuasaan dan juga wewenang dapat merubahan posisi atau struktur yang telah ada. Dari wewenang dan kekuasaan tersebut yang tidak berjalan dengan seimbang yang senantiasa membawa individu pada posisi atas dan posisi bawah yang akan menimbulkan dua golongan yang saling bertentangan yang mana golongan yang berkuasa ingin mempertahankan status quo sedangkan yang dikuasai ingin selalu mengalami perubahan. Dahrendraf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakan golongan tersebut menjadi dua golongan yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan.

A. Sistem *Electronic Voting*

Sistem *Electronic Voting* adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Jadi*Electronic Voting* pada hakekatnya adalah pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara dan pengiriman hasil suara. *Electronic Voting* dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil penghitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, di samping prinsip Luber Jurdil yang ada pada sistem pemilu sekarang, maka penerapan *Electronic Voting* harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Eligibility and Authentication adalah hanya pemilih terdaftar yang dapat memberikan suara.
b. Uniqueness adalah pemilih hanya dapat memilih sekali.
c. Accuracy adalah sistem harus dapat menyimpan pilihan dengan benar.
d. Integrity adalah sistem harus menjamin pilihan tidak dapat diubah, dipalsu dihapus tanpa deteksi.
e. Verifiability and Auditability adalah sistem memungkinkan pengecekan pilihan untuk memeriksa bahwa semua pilihan telah dihitung dengan benar dan harus ada rekaman pilihan yang asli dan terpercaya.
f. Reliability adalah sistem harus dapat bekerja dengan benar tanpa kehilangan satupun pilihan meskipun bila terjadi permasalahan berat pada mesin atau jaringan komunikasi.
g. Secrecy and Non-Coercibility adalah sistem harus menjamin kerahasiaan setiap pemilih untuk mencegah terjadinya penjualan atau pemaksaan suara.
h. Flexibility adalah peralatan pemilihan harus memberikan berbagai macam pilihan format kepada pemilih (misal, memberikan suara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kandidat terdaftar, pertanyaan survei, berbagai bahasa tersedia); cocok dengan teknologi standar; dan dapat digunakan untuk penyandang cacat.

i. Convenience adalah sistem memungkinkan pemilih dapat memberikan pilihannya secara cepat dengan peralatan dan kemampuan minimal.
j. Certifiability adalah sistem harus dapat diujicobakan sehingga penyelenggara pemungutan suara memiliki kepercayaan terhadap sistem.
k. Transparency adalah pemilih harus memiliki pengetahuan umum dan pehamaman terhadap proses pemungutan suara.[28]

Pemilihan adalah proses yang dimana satu set pemilih membuat satu pilihan pribadi orang dari seperangkat kandidat untuk duduk di pemerintahan yang memberikan kekuasaan untuk memerintah pemilih masalah yang berkaitan dengan kantor untuk periode tertentu waktu. Sekelompok pemilih adalah bagian dari semua orang yang didefinisikandalam suatu organisasi, warganya.Dalam sistem terkomputerisasi,warga negara biasanya merupakan pengguna sistem.Penggunaadalah orang dengan otentikasi dan informasi pribadididefinisikan dalam database domain. Lebih sering daripadatidak, data otentikasi adalah pasangan nama pengguna dan kata sandi, digunakan oleh pengguna domain untuk mengotentikasi sendiriselama log masuk.Perangkat lunak aplikasi yang dipergunakan pada pemilihan kepala desa dengan menggunakan *Electronic Voting*adalah perangkat lunak hasil pengembangan dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT melalui Program Sistem Elektronik. Dalam proses *Electronic Voting* ini telah

[28]Nani Purwati, "Perancangan Sistem E-Voting untuk pemilihan kepala daerah" *Journal*, (2015), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diimplementasikan 2 jenis perangkat lunak yang berbeda dalam hal cara penampilan kertas suara elektronik. Dua jenis perangkat ini adalah :

1. Perangkat lunak dengan aktivasi menggunakan tombol
2. Perangkat lunak dengan aktivasi menggunakan *smartcard* (kartu pintar)

Kedua jenis perangkat lunak yang dipergunakan pada prinsipnya memiliki fitur-fitur yang sama, perbedaannya hanya terletak pada mode aktivasi sistem yang selanjutnya menampilkan surat suara elektronik. Jika aktivasi menggunakan *smartcard*, maka pemilih akan diberikan smartcard untuk dapat digunakan dalam melakukan aktivasi menampilkan surat suara elektronik. Sedangkan untuk aktivasi menggunakan tombol, pada saat pemilih di bilik suara, petugas akan menekan tombol aktivasi yang berasal dari input keyboard dan perangkat *eectronic voting* akan menampilkan pilihan calon dalam surat suara elektronik.*Electronic Voting* mempunyai prospek yang baik jika diterapkan pada suatu negara diantaranya adalah:

1. Kebanyakan negara percaya bahwa *Electronic Voting* akan banyak dijumpai pada dekade yang akan datang
2. Pilihan-pilihan dalam *Electronic Voting* dapat memuaskan pemilih karena kenyamanannya
3. *Electronic Voting* dapat memenuhi kebutuhan khusus bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat)
4. Banyak negara yang akhir-akhir ini sudah menerapkan *Electronic Voting* untuk skala kecil
5. Banyak negara yang bermaksud mengganti sistem pemilihan umumnya menemui kesulitan berkenaan dengan terbatasnya pilihan-pilihan yang tersedia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Banyak negara yang tertarik pada sistem *Electronic Voting* layar sentuh. Pemanfaatan Electronic Voting sudah mulai dilakukan pada beberapa negara.[29]

Electroic Voting merupakan sebuah perangkat pemberian suara secara elektronik, sehingga memiliki kemampuan untuk mempercepat tabulasi data, menekan biaya pemilihan dan memiliki kontribusi untuk mencegah pemilih yang tidak berhak. Sedang menurut pendapat lain*Electronic Voting* adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Jadi *Electronic Voting* pada hakekatnya merupakan proses pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran dan pendataan pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman dan pelaporan hasil suara. Penerapan *Electronic Voting* diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional. menawarkan manfaat yang akan diperoleh dalam penerapan *Electronic Voting* sebagai berikut:

1. Mempercepat penghitungan suara
2. Hasil penghitungan suara lebih akurat
3. Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara
4. Menghemat biaya pengiriman kertas suara
5. Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat)
6. Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS)
7. Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa

[29]Nani Purwati, "Perancangan Sistem E-Voting untuk pemilihan kepala daerah" *Journal*, (2015), 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara
9. Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur.[30]

Betapapun rumitnya, sistem untuk on-linepemilihan harus ramah pengguna.Apa gunanya pemilusistem, tidak peduli seberapa baik itu jika tidak digunakan untuk memberikan suara.Diusulkansistem pemilihan harus tampil dengan berikut ini properti operasional.

1. Autentikasi: Hanya pemilih yang berhak dalam golongan pemilihan tertutup dapat memilih. Diselesaikan manntal (daftar pemilih yang berhak dan kandidat yang relevan) disiapkan sebelum dimulainya pemungutan suara perio.
2. Demokrasi: Setiap suara pemilih hanya dihitung sekali dalam pemilihan. Memberi suara dari orang-orang dengan berbedap.eran dapat dihitung dengan jelas. Aturannya seharusnya jelas untuk semua pemilih.
3. Anonimitas: Pemungutan suara tidak boleh dikaitkanseorang pemilih. Privasi adalah hak yang sangat penting yang harus dimiliki seorang pemilihmiliki untuk memastikan perlindungan pribadinya.

[30]Sharil Tumin, Sylvia Encheva, "*A Flexible Implementation of a Web-based Election System for Educational Organizations*" University College Faculty of Technology, Business and Maritime Sciences Bjørnsonsg. Volume 8, (November 2009), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Non-paksaan: Suara tidak dapat dibeli ataudijual dengan alasan apa pun. Pemungutan suara tidak bisa dibuktikan tertarikpihak oleh pemilih atau orang lain setelah itupemeran dan pilihan telah dibuat.
5. Akurasi: Semua suara sah sudah benardihitung dalam penghitungan akhir. Itu tidak mungkinuntuk menghapus suara yang sah dari penghitungan akhir.
6. Keandalan: Semua keliru, palsu atau sebaliknyasuara tidak sah dikeluarkan dari penghitungan akhir.Tidak mungkin untuk memasukkan suara yang tidak sah dipenghitungan akhir.
7. Veracity: Semua pemilih jujur. Setiap pemilihhanya dapat memberikan suara sendiri.
8. Verifiability: Individu pemilih dapat mandiriverifikasi bahwa suaranya dihitung dan itupenghitungan dilakukan dengan jujur dan benar. Pemilihharus dapat memverifikasi bahwa suara mereka telahdicatat dengan benar.
9. Netralitas: Proses pemungutan suara harus adil dan baik kepada pemilih maupun kandidat elektoral. Sementarapemungutan suara masih pada suara harus dirahasiakan sampaifase terakhir.
10. Keterkaitan: Dua suara dari pemilih yang samaharus dihubungkan bersama, tetapi tidak kepada orang yang berperanmereka.

Sistem E-voting ini adalah suatu inovasi baru dalam bentuk penerapan yang merupakan bagian dari E-demokrasi, Hubungan E-voting dan E-demokrasi adalah dua etinitas yang tidak dapat dipisahkan. E-voting

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berjalan dengan baik ketika E-demokrasi telah stabil atau kokoh, E-demokrasi adalah tujuan jangka panjang dari pengembangan E-voting itu sendiri. E-demokrasi merupakan tindak lanjut dari penerapan e-government, tetapi model edemokrasisecara parsial juga banyak dikembangkan. Misalnya The Organization for Economic Co-Operation and Development, mendefinsikan model e-demokrasi ke dalam tiga tahapan.

a. Tahapan informasi (information). Tahapan ini bersifat hubungan searah, di mana lembaga-lembagapemerintah (eksekutif, yudikatif dan legislatif) dan partai politik menghasilkan dan menyalurkaninformasinya kepada masyarakat, dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada warganegara agarberpartisipasi dalam sistem demokrasi suatu negara.
b. Tahapan konsultasi (consultation). Tahapan ini lebih bersifat hubungan dua arah, yang mana warganegaramemberikan feedback kepada lembaga-lembaga pemerintah dan partai politik terkait dengan masalahmasalahpolitik, perumusan dan keputusan kebijakan yang bersifat publik. Tujuan tahapan kedua ini adalahmeningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.
c. Tahapan partisipasi aktif. Pada tahapan ini hubungan didasarkan kepada kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik. Yang mana warga negara diharapkan lebih aktif melibatkan diri dalam proses pembuatan pelbagai kebijakan.

Penggunaan media elektonik yaitu dengan menggunakan sistem *Electronic Voting* adalah sarana untuk merealisasikan harapan keikut sertaan warga negara dalam sistem demokasi yang dikenal dengan istilah e-demokasi.Media elektonik ini diharapkan dapat memainkan peranan penting sebagai penetu agenda pandangan umum masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dalam bentuk perumusan, pembahasan, pelaksanaan dan penilaian undang-undang yang dapat dilaksakan setiap saat dan tidak lagi terikat hanya pada masa musim-musim pemilu umum semata. E-demokrasi merupakan inovasi baru dalam dunia politik, dengan inovasi baru ini perkembangan inovasi-inovasi baru ini, peran aktif dari masyarakat dalam sistem demokrasi dapat ditingkatkan dan kualitas kebijakan publik juga akan semakin lebih baik. Situs-situs partai politik juga menyediakan pelbagai informasi politik yang dapat diakses jarak jauh. Keterlibatan media elektronik ke dalam proses demokrasi, memungkinkan terjadinya debat-debat publik, diskusi publik, mengkritisi dan menganalisis pelbagai keputusan publik. Secara politis, inisiatif penerapan e-demokrasi adalah ingin melibatkan partisipasi masyarakat ke dalam kebijakan-kebijakan publik, agar menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bernilai, transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi dalam kaitannya dengan keputusan keputusan politik.e-demokrasi adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan TIK untuk memfasilitasi dan meningkatkan struktur dan proses demokrasi.

Demokrasi elektronik (e-demokrasi) adalah suatu keharusan di era komputer dan teknologi informasi.E-voting adalah salah satu aplikasi paling penting dari e-demokrasi, karena pentingnya privasi pemilih dan kemungkinan kecurangan.Pemungutan suara secara elektronik adalah bagian paling penting dari e-voting, yang mengacu pada penggunaan komputer atau peralatan voting yang terkomputerisasi untuk memberikan suara bagi pemilih. Karena pertumbuhan pesat teknologi komputer dan kemajuan dalam teknik kriptografi (cara untuk berkomunikasi secara aman), e-voting sekarang menjadi alternatif yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam proses pemilihan.

B. Partisipasi Politik

Samuel P.Huntington dan Joan M. Nelson mengatakan Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Dalam konteks ini, partisipasi menjadi fungsi demokrasi, agar kekuasaan selalu berorientasi pada publik. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Bila suatu negara membatasi akses dan keterlibatan warganya dalam setiap pengambilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan, maka demokrasinya belum dapat dikatakan berkembang secara baik. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran elementer, untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara.[31]Partisipasi politik sendiri merupakan keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan Negara dan secara langsung dan secara tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.[32]

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum atau kepala daerah, menghadiri kegiatan (Kampanye), mengadakan hubungan (*Contacting*) dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya. Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan.Kekuasaan yang otoriter, fasis dan anti demokrasi biasanya menenggelamkan adanya partisipasi politik warga. Urusan kekuasaan disederhanakan hanya sebatas milik para elite politik. Sedangkan rakyat dikondisikan ke arah apatisme. Apatisme sebenarnya merupakan produk

[31]Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 3.
[32]Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: Ikip Semarang Press, 1995), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial, ekonomi dan pengaturan politik tertentu.Seperti di masa orde baru, berbagai regulasi digunakan untuk membungkam partisipasi politik rakyat.Rakyat tidak bebas berekspresi dan berorganisasi. Adanya perbedaan pendapat, kritik dan protes massa dikendalikan dengan teror, kekerasan dan bentuk-bentuk represi lainnya, serta menjadi subjek dalam menentukan arah masa depan societynya.

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang mengangkut atau mempengaruhi hidupnya.[33] Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.[34]

Dalam hubungannya dengan Negara-negara berkembang Samuel P. Hutington dan Joan M. Nelson memberi tafsiran yang lebih luas denganmemasukkan secara eksplisit tindakan *illegal* dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh

[33]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), 140 .
[34]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau *sporadic*, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau *illegal*, efektif atau tidak efektif.

Menurut Samuel P. Huntington pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga Negara, bukan Politikus ataupun Pegawai Negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh Negara ataupun partai yang berkuasa.[35]Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik Dalam konsep ini memang tidak dibedakan secara tegas apakah partisipasi politik itu bersifat otonom atau mobilisasi.

Hal ini terjadi menurut Huntington dan Nelson, disebabkan oleh sejumlah alasan berikut: Pertama, perbedaan antara keduanya lebih tajam dalam prinsip daripada di alam realitas. Kedua, dapat dikatakan semua sistem politik mencakup suatu campuran keduanya. Ketiga, hubungan keduanya bersifat dinamis, artinya bahwa partisipasi politik yang bersifat dimobilisasi karena faktor internalisasi pada akhirnya akan menjadi partisipasi yang bersifat otonom.[36]Sebaliknya juga demikian, partisipasi politik yang bersifat otonom akan berubah menjadi dimobilisasi. Keempat,

---

[35]Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 9-10.

[36]Kamaruddin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi; Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*. Jakarta : Visi Publishing, 2003. hal. 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua bentuk partisipasi tersebut mempunyai konsekuensi penting bagi sistem politik. Baik yang dimobilisasi atau otonom memberikan peluang-peluang kepemimpinan dan menimbulkan kekangan-kekangan terhadap pimpinan-pimpinan politik.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik menurut peneliti adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga dalam proses Pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya Pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan merekatermasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan, serta merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan warga secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

C. Model Dan Bentuk Partisipasi Politik

Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model ini terbagi kedalam 2 bagian besar: *Conventional* dan *Unconventional. Conventional* adalah model klasik partisipasi politik seperti pemilu dan kegiatan kampanye. Model partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. *Unconventional* adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring munculkan Gerakan Sosial Baru *(New Social Movements)*. Dalam gerakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan environmentalist, gerakan perempuan gelombang feminist, protes mahasiswa, dan teror. Jika model partisipasi politik bersumber pada faktor "kebiasaan" partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi 4 bagian yaitu diantaranya[37]:

1. Kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
2. *Lobby*, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. *Contacting*, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan tindakan kekerasan *(violence),* yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan

[37]Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, terror, kudeta, pembutuhan politik *(assassination),* revolusi dan pemberontakan.

Bila dilihat dari jumlah pelaku, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi berikut:

a. Partisipasi individual, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh orang perorang secara individual, misalnya menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah.
b. Partisipasi kolektif, yakni kegiatan politik yang dilakukan oleh sejumlah warga negara secara serentak yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa. Partisipasi kolektif ini di bagi lagi menjadi dua, yaitu konvensional dan non-konvensional.

Berdasarkan Saluran Politik Berdasarkan bentuk dan saluran politik,membagi partisipasi politik kedalam partisipasi konvensional dan partisipasi non konvensional.

1. Partisipasi Konvensional Partisipasi ini dilakukan dengan saluran resmi dan dalam bentuk yang normal dalam demokrasi modern.
2. Non Konvensional Partisipasi ini dilakukan melalui sarana tidak resmi dan dalam bentuk tidak normal.

Partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington bahwa kegiatan yang dilakukan oleh warga negara preman dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.Partisipasi itu dapat secara spontan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sinambung atau sporadis, secara damai atau dengan kekeraasan.Didalam partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warga negara preman yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Adapun beberapa aspek dari definisi inti diantara lain[38] :

1. Mencakup kegiatan kegiatan akan tetapi tidak sikap sikap. Sebagai kontras, mendefinisikan partisipasi politik sebagai juga mencakup orientasi orientasi para warga negara terhadap politik, minat terhadap politik mereka yang nyata.
2. Kegiatan politik warga negara preman atau lebih tepat lagi perorangan-perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara preman dengan demikian kami menarik garis antara partisipasi politik dengan orang-orang profesional di bidang politik.
3. Para partisipan dapat berusaha untuk menggantikan pengambilan keputusan pada waktu enggan orang-orang lain yang mereka harapkan akan lebih tanggap terhadap preferensi-preferensi dari kebutuhan mereka yang lebih jangan terjadi para partisipasi politik dapat mengubah aspek-aspek politik itu sendiri atau mengubah secar mendasar struktur sistem itu secara keseluruhan agar supaya pemerintah bersikap lebih tanggap terhadap keinginan para partisipan.

[38]Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Faktor-faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi partisipasi politik

Faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya suatu partisipasi masyarakat adalah tingkat kepercayaan atau trust masyarakat terhadap para pemimpin bangsa, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut maka membagi partisipasi politikSamuel P. Huntington juga mendefinisikan partisipasi masyarakat dibagi menjadi 2 macam yaitu partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif). Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentukbentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidak puasan warga negara.[39]

Partisipasi Politik dapat dikategorikan Berdasarkan kesadaran politik Otonom Partisipasi dilakukan atas dasar kesadaran sendiri, Mobilisasi Partisipasi dilakukan berdasarkan anjuran, ajakan atau paksaan pihak lain Namun harus disadari bahwa partisipasi politik otonom maupun dimobilisasi bukanlah sesuatu yang dikotomis, tapi merupakan sebuah spektrum. Karena banyak sekali bentuk partisipasi yang bersifat arbitrer, berada diantara partisipasi politik otonom atau mobilisasi.Sebagai contoh, sulit untuk mengatakan bahwa peserta kampanye partai politik dalam sebuah pemilu betul-betul otonom atau betul-betul dimobilisasi. Bisa jadi ia ikut berkampanye karena kesadaran namun menerima berbagai atribut dan fasilitas bahkan uang dari partai pelaksana kampanye.[40]

Dimungkinkan juga terdapat pergeseran dari satu bentuk mobilisasi ke bentuk yang lain. Seseorang yang terlibat kampanye karena sekedar ingin mendapatkan keuntungan (dimobilisasi) dapat menjadi diinternalisasikan sehingga kemudian menjadi otonom, dan begitu juga sebaliknya.Partisipasi politik dalam pemilu di Indonesia amatlah tinggi, namun menurun ketika reformasi terjadi.Tingginya partisipasi politik dalam pemilu-pemilu orde baru bisa dipahami sebagai kuatnya mobilisasi

[39]Samuel P. Huntington dan Nelson dalam Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 368.
[40]Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah orde baru mendorong partisipasi politik (yang dimobilisasi) dengan memaknai memilih sebagai kewajiban.Namun ketika kebebasan dilindungi dan memilih dipandang sebagai hak, maka banyak warga yang tidak menggunakannya.[41]

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat menurutSamuel P. Huntington dan Joan Nelson sebagai berikut :

1. Faktor Sosial Ekonomi Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik, yaitu :
   a. Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan ikut mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat di desa malang Rapat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tajam pula seseorang dalam menganalisa informasi tentang politik dan persoalan-persoalan sosial yang diterima semakin meningkat dan menciptakan minat dan kemampuanya dalamberpolitik. Karena itu pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk di perhatikan.
   b. Pengaruh Keluarga Keluarga merupakan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat di di Desa Malang Rapat. Pemimpin keluarga yaitu ayah adalah orang yang mempengaruhi dalam keluarga tersebut, memilih atau tidak ikut memilih akan memberikan pengaruh terhadap anggota keluarga lainnya.

[41] Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pekerjaan, Pekerjaan tertentu sangat mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi politik. para pemilih yang bekerja diluar lembaga-lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah tidak terlalu memikirkan kehadiran mereka dalam pemilihan umum, berbeda dengan pemilih yang bekerja dilembaga yang berhubungan langsung dengan kebijkan pemerintah, pemilih tersebut cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya pada saat pemilu. Biasanya para pegawai negeri tingkat kehadiran mereka lebih tinggi dikarenakan mereka sering langsung berhubungan dengan kebijakan pemerintah.

2. Faktor Politik Faktor politik meliputi :

a. Pengetahuan masyarakat akan proses pengambilan keputusan yang menentukan keputusan yang akan diambil.

b. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyatnya sebagai interaksi yang mempengaruhi kelakuan manusia dalam suatu keadaan yang bersifat politik.

c. Kesadaran politik Dapat diartikan perhatian seseorang terhadap permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat maupun politik.[42]

[42] *Ibid.* 102-103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Landasan Partisipasi Politik

Landasan yang lazim digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi politik adalah :

a. Kelas : perorangan-pperorangan dengan setatus sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa
b. Kelompok : perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
c. Lingkungan (neighborhood) : perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
d. Partai: perorangan yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atu mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.
e. Golongan (faction) : perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh intraksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron-klien, artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik diantara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.[43]

[43]Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat bahwa yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi prilaku politik, adalah :

1. Lingkungan sosial politik tidak langsung seperti sistem politik, media masa, sistem budaya, dan lain-lain.
2. Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kebribadian aktor seperti keluarga, teman agama, kelas, dan sebagainya.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
4. Faktor sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan politik, seperti suasana kelompok, ancaman, dan lain-lain.

F. Konflik Sistem *Electronic Voting*

Pemanfaatan teknologi yaitu dengan menggunakan sistem Electronic Voting untuk dijadikan dalam pemilihan umum bisa berpotensi melahirkan masalah baru seperti yang terjadi di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjodi Desa tersebut masih banyak sekali kendala-kendala yang terjadi seperti sistem yang sering error, kelalaian panitia dalam menstabilkan proses penggunaan sistem Electronic Voting sehingga menimbulkan ada selisih suara berjumlah 36 dalam penghitungan suara, yang menyebabkan demonstrasi besar-besaran dikantor kelurahan untuk mempertanggung jawabkan hasil tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini yang paling berperan dalam pemungutan suara yang menggunakan sistem Electronic Voting adalah panitia, dimana panitia seharusnya tahu betul apa itu sistem Electronic Voting itu namun berdasarkan riset dari peneliti disini bisa dianalisa bahwa panitia di Klantingsari itu masih belum paham betul bagaimana proses penggunaan sistem tersebut, namun aktor penyebab permasalahan sistem ini masih dipertanyakan, apakah memang dari panitianya atau dari proses pemilihan panitianya, dan akan dikaji dan dianalisa lebih lanjut oleh peneliti dibab IV. Dalam menyempurnakan hasil riset peneliti, permasalahan jika tidak didasarkan pada solusi-solusi untuk menjawab tantangan yang ada. Sehingga intensi Pemerintah maupun DPR yang dirasa bersandar pada selera teknologi ini sangat dipertanyakan masalah pemilu yang berkaitan dengan sistem penghitungan suara bukan berada di TPS.Sistem pemungutan suara di TPS berjalan sangat baik, transparan dan menjadi standar internasional.Dan selama ini, pungut hitung dengan pendekatan manual berjalan sangat baik tanpa persoalan. Prosesnya sangat transparan, karena setiap aktor pemilu baik penyelenggara pemilu, calon kandidat atau partai politik, pemilih dan masyarakat umum dapat terlibat secara langsung dan aktif dalam proses penghitungan. Kualitas akuntabilitasnya juga sangat tinggi, setiap elemen yang hadir dapat mengkonfirmasi keabsahan setiap suara pemilih tanpa ada sekat intelektual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Teori Konflik

Teori konflik Ralf Dahrendorf dikembangkan untuk menentang teori Fungsional Struktural. Karena itu tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan proposisi yang terdapat dalam teori Fungsional Struktural. Jika menurut teori Fungsional Struktural bahwa masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, maka menurut teori konflik Ralf Dahrendorf adalah sebaliknya, dalam hal ini masyarakat dianggap berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya.[44] Jika menurut teori Fungsional Struktural bahwa setiap elemen atau institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi social dalam masyarakat.

Perbedaan lainnya, penganut teori Fungsional Struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum, sedangkan teori konflik melihat bahwa keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.[45]

---

[44] Novri Susan, *pengantar Sosiologi Konflik*, (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, 2014),44.

[45]George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori itu merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat berisiganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama. Dahrendorf adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena ituteori sosiologi harusdibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teoritisi konsensus harus menguji nilai integrasi dalammasyarakat dan teoritisi konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kitatidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya.[46]

Konsep teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog. Struktur yang sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan di dalam susunan peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapatkan dominasi.

[46]George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Classical Sociological Theory,* (McGraw-Hill, 2004),154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas utama menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat.

Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua tipe. Kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok yang kedua yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.[47]

Kepentingan kelas *objektif* yang ditentukan secara struktural yang tidak disadari oleh individu di sebut Dahrendorf dengan kepentingan laten (*latent interest*), dimana kepentingan itu tidak dapat menjadi dasar yang jelas dalam pembentukan kelompok. Para anggota di dalam asosiasi yang dikoordinasi secara imperatif itu memiliki kepentingan laten yang samadapat dipandang sebagai kelompok semu (*quasi group*). Sebaliknyakepentingan kelas yang disadari individu terutama kalau kepentingan itudengan sadar dikejar sebagai tujuan disebut sebagai kepentingan *manifest*.

[47]Novri Susan, *pengantar Sosiologi Konflik*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2014),43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun para anggota suatu kelompok kepentingan yang bersifat konflik diambil dari kelompok semu yang sama, tidak semua orang yang termasuk dalam kelompok semu yang sama itu harus bergabung dalamsuatu kelompok kepentingan yang bersifat konflik untuk mengejar kepentingan kelasnya.

Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Konflik menurutnya memimpin kearah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitupula kalau konflikitu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akanefektif.

Teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dalam hal ini Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lewis Coser yang memusatkan perhatian pada fungsi konflik dalam mempertahankan *status quo*. Tetapi Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dari konflik hanyalah satu bagian realitas sosial, konflik juga menyebabkan perubahan dan perkembangan. Singkatnya, Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktursosial.

Pierre van den Berghe mengemukakan empat fungsi dari konflik:

1. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas
2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi

4. Fungsi komunikasi.

H. Dialektika Konflik Kekuasaan

Dialektika konflik kekuasaan menurut Daherendorf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Karena kekuasaan sendiri adalah sebagai kewenangan yang melekat secara legal akibat posisi dari individu di dalam sistem dan struktur sosialnya.[48]

Dahrendorf melihat wewenang adalah relasi wewenang yaitu selalu relasi antara super dan sub-ordinasi dimana ada relasi wewenang, kelompok siperdinasi selalu diharapkan mengontrol prilaku kelompok superordinasi melalui permintaan dan perintah serta peringatan dan larangan berbagai harapan tertanam relarif permanen dari posisi sosial dari pada karakter individual. Dengan keberadaan fakta ini mereka selalu melibatkan spesifikasi subjek perorangan untuk mengontrol dan dan spesifikasi dari ruang sosial (*spheres*) yang kontrol mungkin dilakukan wewenang menjadi hubungan terlegitimasi tanpa perotes dengan perintah-perintah otoritatif.

[48]Novri Susan, *pengantar Sosiologi Konflik*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2014),40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Resolusi dalam konflik antara kelompok itu adalah redistribusi kekuasaan atau wewenang, kemudian menjadiakan konflik itu sebagai sumber dari perubahan dalam sistem sosial.Selanjutnya sekelompok peran baru memegang kunci kekuasaan dan wewenang dan yang lainnya dalam posisi dibawahnya yang diatur. Redistribusi kekuasaan dan wewenang merupakan pelembagaan dari kelompok peranan baru yang mengatur (*ruling class*) versus peranan yang diatur (*ruled class*), yaitu dalam kondisi khusus kontes perebutan wewenang akan kembali muncul dengan inisiatif kelompok kepentingan yang ada dan dengan kondisi ssituasi yang berbeda. Sehingga kenyataan sosial merupakan siklus tak berakhir dari adanya konflik wewenang dalam berbagai jenis tipe kelompok terkoordinasi dari sistem sosial.[49]

Dahrendorf menyebut teori konfliknya sebagai sosiologi konflik dialektis yang menjelaskan proses terus-menerus distribusi kekuasaan dan wewenang diantara kelompok-kelompok terkoordinasi. Sehingga kenyataan sosial, bagi Dahrendorf merupakan siklus tak berakhir dari adanya konflik wewenang dalam berbagai jenis tipe kelompok terkoordinasi dari sistem sosial.Anthony Giddens menyebut dinamika konflik ini sebagai dialektika kontrol dalam sistem sosial (*dialectic of control in social system*).Pihak-pihak berkonflik dengan kekuasaan yang mereka miliki memiliki kapasitas transformatif, sehingga mereka mampu

[49]Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan negosiasi dan menciptakan suatu gerakan sosial untuk mencapai kepentingan yang menjadi tujuan mereka.

I. Bentuk-Bentuk Konflik

Secara garis besar konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk antara lain:

1. Berdasarkan sifatnya.

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktuif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidaksenang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Sedangkan konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.

2. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflikdapat dibedakan menjadi konflik vertikal, konflik horizontal dan konflik diagonal. Konflik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

vertikal merupakan konflik antar kelompok masyarakat di dalam satustruktur sosial atau struktur politik dan pemerintahan yang memiliki hierarki. Sedangkan konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Sekanjutnya konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan pembagian alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim.

Selanjutnya Ralf Dahrendorf menyebutkan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut :

1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasadisebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individumenghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.[50]
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
4. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antarnegara, atau organisasi internasional.

J. Resolusi Konflik

Dalam upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, ada istilah resolusi konflik. Resolusi konflik dapat diartikan

[50] Novri Susan, *pengantar Sosiologi Konflik*, (PRENADAMEDIA GROUP, 2014),85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai usaha menyelesaikan konflik dengan cara-cara analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik dijalankan untuk memberikan penyelesaian yang diterima. Menurut Hardjana resolusi konflik terdiri dari 5 (lima) bentuk. Pertama, bersaing dan bertanding menguasai dan memaksa.Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang-kalah. Kedua, kerjasama dan menghadapi. Dalam hal ini, pihak yang terlibat konflik bekerjasama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara ini merupakan pendekatan menang-menang. Ketiga, kompromi dan berunding. Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang/ kalah. Keempat, menghindari atau menarik. Dalam pendekatan kalah-kalah ini, kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing bahkan mereka tidak menarik perhatian pada perkara yang dikonflikkan. Kelima, menyesuaikan memperlunak. Bentuk pengelolaan konflik ini merupakan pendekatan kalah-menang.[51]

Tingkat keberhasilan suatu resolusi konflik dikaitkan dengan efektivitas resolusi konflik. Efektivitas resolusi konflik secara umum lebih dilihat dalam 3 (tiga) tingkatan. Pertama, efektivitas yang tinggi yaitu upaya resolusi berhasil mentransformasikan konflik politik menjadi consensus. Kedua, efektivitas semu. Resolusi konflik hanya berhasil menekan bentuk konflik politik dari permukaan atas ke bawah permukaan.

[51]Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2014). Hal. 116-117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, efektivitas yang rendah, yaitu resolusi konflik yang tidak berhasil meresolusikan konflik menjadi konsensus, baik secara substansial maupun semu. Bentuk dari konflik ini biasanya dimatikan secara *koersif/represif*

menurut Dahrendorf, perlu diadakan suatu peraturan pertentangan yang mensyaratkan tiga faktor.

1. kedua kelompok yang terlibat dalam pertentangan harus mengakui pentingnya dan nyatanya situasi pertentangan dan dalam hal ini, mengakui keadilan fundamental dari maksud pihak lawan. Pengakuan adilnya maksud lawan tentu saja bukan berarti bahwa subtansi kepentingan lawan harus diakui sebagai adil dari awal. Pengakuan di sini berarti bahwa kedua kelompok yang bertentangan menerima untuk apa pertentangan itu, yakni menerimanya sebagai suatu hasil pertumbuhan yang tak terelakkan.
2. organisasi kelompok- kelompok ke pentingan. Selama kekuatan- kekuatan yang bertentangan itu terpencar- pencar dalam kesatuan yang kecil yang masing- masing erat ikatannya, peraturan pertentangan tidak akan efektif.
3. adanya keharusan bagi kelompok- kelompok yang berlawanan dalam pertentangan sosial menyetujui aturan formal tertentu yang menyediakan kerangka hubungan bagi mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan buku panduan pengelolaan konflik yang dikeluarkan oleh The British Council, bahwa penyelesaian suatu konflik yang terjadi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Negosiasi, suatu proses untuk memungkinkan pihak- pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan pilihan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka.
2. Mediasi, suatu proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga sehingga pihakpihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri.
3. Arbitrasi atau perwalian dalam sengketa, tindakan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutuskan dan menjalankan suatu penyelesaian.[52]

[52]https://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/6927-teori-resolusi-konflik.html (sabtu, 14 juli 2018, 13:26)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SETTING PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan beberapa data yang akan dipaparkan diantara lain : Gambaran umum lokasi penelitian, jumlah penduduk lokasi penelitian, jumlah DPT pemilih, keadaan sosial, aspek pendidikan, aspek ekonomi, dan budayadi Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian.

Selain itu peneliti akan memaparkan mengenai proses *Electronic Voting,* alasan kenapa desa Klantingsari terpilih menggunakan sistem *Electronic Voting* dan partisipasi masyarkat terkait diadakannya sistem *Electronic Voting* di Desa Klantingsari.

A. DeskripsiUmumSubyekPenelitian

1. GambaranUmumLokasiPenelitian

Wilayah desaKlantingsariterdiridari 4 dusunyaitu: wonosari, klanting, bokongisordandusunbokongdukur yang masing-masingdipimpinolehseorangkepaladusun.Posisikasunmenjadisangatstrategisseiringbanyaknyalimpahantugasdesakepadaaparatini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di DesaKlantingsari, dari keempat dusun tersebut terbagi menjadi 6 rukun warga atau RW dan 21 rukun tetangga atau RT.

Secara topografi ketinggian desaini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 14m diatas permukaan laut, terletak diKecamatan tarik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikabupaten sidoarjo memiliki luas administrasi 137.975 Ha. Secara administrative desa klanting sari terletak diwilayah Kecamatan tarik kabupaten sidoarjo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

Tabel 3.1

Batas Wilayah Desa Klantingsari Tahun 2017

Sebelah Utara	Desa Kalimati
Sebelah Timur	Kedung Wonokerto
Sebelah Selatan	Desa Prambon
Sebelah Barat	Desa Kendal Sewu

Sumber data : buku profil Desa Klantingsari tahun 2017

JaraktempuhdesaKlantingsari. Keibukota Kecamatan adalah ± 5km, yang dapat ditempuh dengan waktu 11 menit. Denganjaraktempuhkeibukota 23km, yang dapatditempuhdenganwaktusekitar 45 menit. Polapembangunanlahan di desaklangtingsarilebihdidominasiolehkegiatanpertanianpanganyaitupalawija (padi, jagung) denganpenggunaanirigasiteknis.

Penduduk Desa Klantingsari merupakan masyarakat pribumi asli yang telah lama menghuni daerah tersebut. Penduduk Desa Klantingsari saat ini adalah 3.970 jiwa terdiri dari 1.115 KK. Dari jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi penduduk laki-laki 2030 jiwa dan perempuan 1940 jiwa.[53] Seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

[53]Supratono, *wawancara,*desaklantingsari, 14 mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Jumlah Pemilih Penduduk Desa Klantingsari tahun 2018

Desa Klantingsari	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah LK+PR	jumlah tidak memilih
Wonosari	558	574	1.132	106
Klanting	240	237	477	81
Bokongisor	441	427	868	91
Bokongduwur	136	111	247	119
Total	1.375	1.349	2.724	397

Sumber : data Electronic Voting Klantingsari

Tabel 3.3

Jumlah DPT Penduduk Desa Klantingsari tahun 2018

Desa Klantingsari	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah DPT
Dusun Wonosari	618	621	1239
Dusun Klanting	283	274	557
Dusun Bokongisor	495	464	959
Dusun Bokong Duwur	190	176	366

Sumber :wawancarasupratonokasiperencanaan

Tabel 3.4
Kalkulasi jumlah DPT dengan Jumlah pemilih

jumlah DPT diKlantingsari sejumlah = 3.121
jumlah pemilih diKlantingsari sejumlah = 2.724
jumlah tidak memilih sejumlah = 397
hasil jumlah suara sejumlah = 2760
selisih = 36 suara

Sumber : Kalkulasi dari tabel DPT dengan jumlah pemilih

Dari populasi penduduk tersebut sebagaian besar didominasi oleh penduduk usia produktif. Dan aktifitas mobilisisai di DesaKlantingsari cukup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi, khususnya mobilisasi angkutan, hasil-hasil pertanian mapun sumber-sumber kegiatan lainnya. Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan berupa polindes yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun demikian masih banyak permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah social seperti kemiskinan serta pengangguran dan kenakalan remaja.

Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi yang berada di Desakurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan sumberdaya manusia yang memenuhi, misalnya keberadaan lahan pertanian yang luas di DesaKlantingsari tidak bias mengangkat derajat penduduk tani karena produktifitasnya tidak maksimal bahkan relative rendah, sarana irigasi yang kurang memadahi serta sumberdaya parapetani yang baik yang berupa modal maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern yang relative masih kurang. Akibatnya banyak masyarakat petani yang taraf hidupnya masih digaris kemiskinan.

2. SejarahDesaKlantingsari

SebelumdinamakandesaKlantingsaridinamakandesawonosari.Desater sebutmemiliki 4 dusunyaitu: wonosari, klanting, bokongisordanbokongdukur. Selaindiatasadadukuh yang tempatnyaterpencilnamanyatelogoikutdusunbokongisor. Pada waktu itu bapak lurahnya bernama Ibrahim. Tiap dusun dipimpin oleh seseorang yang namanya gabdelurah atau keapala dusun/bayan. Bapak Ibrahim menjabat dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1942-1953. Suatu hari bapak lurah mengundang masing-masing gabdelurah untuk berbandring/musyawarah merubah namadesa.

Setelah musyawarah memperoleh mufakat dari nama desa wonosari menjadi Klantingsari. Dengan mendapat seorang gabde lurah yang paling sesepuh, dengan sebuah cerita yang mengatakan bahwa: didusun klanting ada seorang janda tua tidak punya anak bekerjanya setiap hari menjual jajan klanting yang terbuat dari kaspe/pohong sambil menggendong kendil berisi joruh/sari gula jualan kedusun wonosari, dari pagi sampai sore hari baru pulang.

Karenaitulahdisimpulkandesasemulawonosaridilengketkandengandusunklantin g, terbentuklahdesaKlantingsari.

3. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan system politik di indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Klantingsari tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa.

a) Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal yang sangat penting dalam mengajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan

Tabel 3.5

Aspek Pendidikan Desa Klantingsari tahun 2018

No	Keterangan	Jumlah
1.	Tamat sekolah SD	0
2.	Tamat sekolah SMP	143
3.	Tamat sekolah SMA	1014
4.	Tamat D-3	28
5.	Tamat S-1	127
6.	Tamat S-2	24

Sumber :wawancarasupratonokasiperencanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b)Aspek ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Klantingsari RP. 60.000,- Sacara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Klantingsari dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain

Tabel 3.6

Aspek ekonomi di DesaKlantingsari Tahun 2018

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	837
2	jasa pemerintahan/non pemerintahan :	
	pegawai negeri sipil	12
	pegawai desa	34
	Guru	30
	ABRI/Polisi	13
	bidan Atau mantri	6
	lain-lain	113
	pegawai swasta	170
3	jasa perdagangan	
	warung/kios	36
	Toko	21
4	jasa keterampilan	
	tukang kayu	30
	tukang batu	30
	Penjahit	2

Sumber :wawancarasupratonokasipperencanaan

Dengan melihat data diatas maka angka pengangguran di Desa Klantingsari masih cukup rendah.

c) Aspek keagamaan

Agama di Desa Klantingsari tidak terjadi suatu keberagaman. Dimana seluruh penduduknya beragama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.7

Jumlah masjid dan musholah di Desa Klantingsari tahun 2018

Sarana Ibadah	Jumlah (unit)
Musholah	15
Masjid	2

Sumber :wawancarasupratonokasipperencanaan

d) Aspek budaya

Sosial budaya merupakan suatu totalitas nilai, tata sosial, tata laku manusia yang diwujudkan dalam pandang hidup, falsafah negara dalam berbagai sisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjadi asa untuk melandasi pola perilaku dan tata struktur masyarakat yang ada. Tanpa terkecuali, pada aspek ini didasarkan pada pola kebiasaan masyarakat dalam menjalankan rutinitas dalam hal kebudayaan. Namun demikian, ada juga aturan atau norma-norma yang berfungsi mengatur seluruh perilaku sesorang di dalam masyarakat, di mana hal itu sangat dipatuhi oleh penduduk Desa Klantingsari. Aturan tersebut berupa aturan-aturan tak tertulis, yang sudah ada pada sejak dulu dan secara turun menurun dipatuhi oleh masyarakat Desa Klantingsari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Gambaran Umum Penerapan Electronic Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo

Sesuai amanat peraturan Bupati Sidoarjo nomor 86 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati nomor 5 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa dimana pemerintah daerah diminta membuat Peraturan Daerah tentang Desa, maka Kabupaten Sidoarjo mewujudkan ini sekaligus melengkapi dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menjelaskan prosedur pemilihan kepala desa dengan *Electronic Voting*. Keduanya disahkan DPRD awal 2015.

Dan kedua legalitas ini dijadikan sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa Kabupaten Sidoarjo ada 70 desa yang mengikuti pilkades serentak ini dari 17 Kecamatan dan 14 desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting* dan 56 desa yang mengunakan manual. Dan desa Klantingsari termasuk terpilih menggunakan pemilihan kepala desa dengan sistem *Electronic Voting* ini adalah suatu apresiasi yang sangat luar biasa untuk desa Klantingsari karena dari 70 desa yang mengikuti pelaksanaan pilkades serentak yang diantaranya 56 desa yang masih menggunakan sitem manual desa Klantingsari terpilih untuk mencoba sistem *Electronic Voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pengadaan peralatan pendukung sebagaimana spesifikasi yang disarankan oleh BPPT diadakan oleh bidang Pemerintahan Desa sebanyak 23 Unit. Selanjutnya BPPT membantu penyiapan aplikasinya serta manajemen keamanan yang disesuaikan dengan perangkat yang digunakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membentuk organisasi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Panitia Kabupaten, Tenaga Pendamping dan Tenaga Teknis yang diatur dengan Keputusan Bupati Mengadakan pelatihan dan Sertifikasi kepada Tenaga Teknis *Electronic Voting*. Selanjutnya Tenaga Teknis memberikan pelatihan kepada Panitia Desa yang telah Ditetapkan oleh BPD. Penyusunan Prosedur Tetap Pemilihan Kepala Desa yang menggunakan sistem Berbasis Teknologi Informasi *Electronic Voting* yaitu DRE (Direct Recording Electronic) Layar Sentuh.

Pemungutan suara secara *Electronic Voting* dalam pemilihan umum pada saat ini merupakan pilihan sangat penting dalam melaksanakan salah satu pilar demokrasi yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin. Dengan peran desa yang semakin menantang dan menjanjikan dan dipimpin oleh kepala desa yang wajib mengembangkan demokrasi desa, maka pemilihan kepala desa dengan *Electronic Voting* diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan menghasilkan Kepala Desa sesuai pilihan masyarakat.

1. **Desa klantingari Kecamatan tarik kabupaten Sidoarjo terpilih sebagai salah satu yang menggunakan sistem *Electronic Voting***

Kota Sidoarjo merupakan Ibukota Kecamatan Sidoarjo yang terletak di tepi Selat Madura dan termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur Batas-batas administrasi dari kota Sidoarjo ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.8

Batas wilayah kabupaten sidoarjo Tahun 2018

sebelah utara	Kecamatan waru
sebelah timur	selat Madura
sebelah selatan	Kecamatan porong
sebelah barat	Kecamatan krian

Sumber data : profil Desa Klantingsari tahun 2017

Secara geografis wilayah Kota Sidoarjo memiliki luas wilayah 6.256 Ha. Ditinjau dari Topografi keadaan medan Kota Sidoarjo berada pada ketinggian antara 23 - 32 diatas permukaan laut.

Pada kamis 22 februari diberitahukan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa dikabupaten sidoarjo, jawa timur akan mengunakan sistem *Electronic Voting* dan manual sehingga suara pemlih bisa langsung masuk ke penghitungan suara tanpa ada kecurangan. Kepala badan pengkajian dan penerapan teknologi (BPPT),[54] yang diwakili oleh direktur pusat Teknologi informasi dan Komunikasi kedeputian Bidang teknologi informasi, Energi dan Material DR. Dipl-ng Michael Andreas Purwodadi, DEA menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa secara elektronik ini merupakan suatu inovasi bagi kabupaten sidoarjo dan didukung oleh BPPT sepenuhnya. Penerapan sistem *Electronic Voting* ini akan mengubah mindset masyarakat dan pola pemilu manual mencoblos ke sistem modern yaitu menyentuh gambar pada layar monitor.

[54]https://www.antaranews.com/berita/687934/pemilihan-kepala-desa-sidoarjo-gunakane-voting diakses pada tanggal 29-06-29-2018 pukul 09:45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bupati Sidoarjo Saifullah, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan pendatanganan kesepatan dan kerjasama *Electronic Voting* ini dan menandakan bahwa pemerintah daerah dan semua pihak terkait sangat berkomiten untuk mensukseskan pilkades serentak ini, baik secara *Electronic Voting* maupun manual. Kabupaten Sidoarjo ada 70 desa yang mengikuti pilkades serentak ini dari 17 Kecamatan dan 14 desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting* dan 56 desa yang mengunakan manual. Dan desa Klantingsari termasuk terpilih menggunakan pemilihan kepala desa dengan sistem *Electronic Voting* ini adalah suatu apresiasi yang sangat luar biasa untuk desa Klantingsari karena dari 70 desa yang mengikuti pelaksanaan pilkades serentak yang diantaranya 56 desa yang masih menggunakan sitem manual desa Klantingsari terpilih untuk mencoba sistem *Electronic Voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal ini seperti diungkapkan dalam wawancara berikut.

> "*... kami selaku kepala desa sangat senang sekalai karena desa kami terpilih untuk menggunakan sesuatu yang baru untuk pemilihan kepala desa di periode yang akan datang, tapi ini semua bukan muri dari kegigihan dan skill saya tapi melainkan kekompakan dari aparat-aparat desa sehingga kami dipercaya untuk menggunakan sistem Electronic Voting, meskipun banyak konsekusiensi yang akan terjadi pada saat mengunakan sistem tersebut kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan pemiihan yang secara luber jurdil karena sistem ini lebih cepat dari sistem manual"*[55]

Ungkapan Kepala Desa KlantingsariKecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang sekaran kembali menjabat sebagai kepala desa dalam wawancara tentang pelaksanaan sistem *Electronic Voting.*

[55] Wawan Setyo Budi, Wawancara, Sidoarjo, 21 mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proses *Electronic Voting* di Desa Klantingsari

Gambar 3.1

proses *eletronic voting*

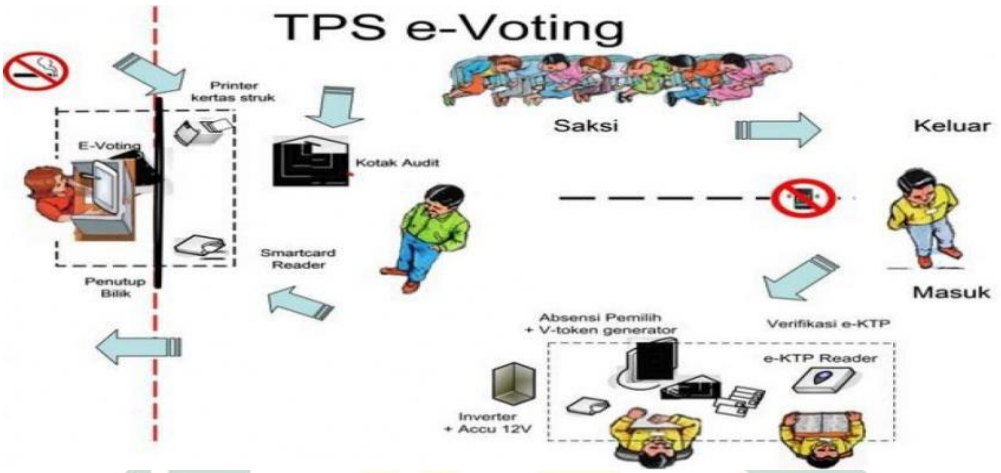

Sumber: Beritabali.com

Dari gambar diatas dijelaskan proses *Electronic Voting* yang diKlantingsari diantaranya sebagai berikut:

1. Pemilih masuk kedalam TPS dengan membawa KTP elektronik
2. pemilih melakukan verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan mengambil kartu token untuk dimasukkan di mesin Electronic Voting. Mesin e-verifikasi tidak hanya memeriksa kecocokan KTP elektronik dengan DPT, tetapi sekaligus mencoret identitas yang bersangkutan dari DPT untuk menghindari pemilih ganda.
3. pemilih masuk ke bilik suara dan memasukkan kartu smart card ke mesin Electronic Voting. Di bilik, pemilih mencolek gambar calon yang diinginkan, lalu menekan hingga keluar kotak pilihan ya dan tidak, lalu memilih kotak ya.
4. Keempat, pemilih memasukkan kartu audit yang keluar dari mesin Electronic Voting ke dalam kotak audit. Kotak audit yang memuat informasi pilihan pemilih tak akan dibuka apabila tak ada sengketa hasil.
5. pemilih mencelupkan jari ke kotak tinta sebagai tanda telah memilih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang Menggunakan *Electronic Voting* di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

Menurut peraturan bupati sidoarjo nomor 86 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas perarturan bupati nomor 5 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. Dan juga keputusan badan permusyawaratan desa Klantingsari bahwasanya pembentukan panitia pemilihan kepala desa di pilih langsung oleh badan permusyaratan desa dengan musyawarah dan mufakat. Diantara lain sistem panitia yang terpilih sebagai berikut:

Tabel 3.9
Susunan panitia *Electronic Voting*

No	Nama	Kedudukan Dalam Panitia Pemilihan
1.	Khoirul Anas	Ketua
2.	Mulyatno	Wakil Ketua
3.	Mulyo Hadi	Sekertaris
4.	Mustofa Dimyati	Bendahara
5.	Anang Ariyanto	Anggota
6.	Eko Widodo	Anggota
7.	Supraptono	Anggota
8.	Abdul Rohman	Anggota
9.	Bashori	Anggota
10.	Abdul Karim	Anggota
11.	Debi Irawan	Anggota
12.	Saptuman	Anggota
13.	Moh. Iswanto	Anggota
14.	Khusnul Khotimah	Anggota
15.	Nurwati	Anggota
16.	Ayu Indah Lestari	Anggota
17.	Sudibyo	Anggota

Sumber :wawancarasupratonokasipperencanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Sehubungan dengan tema penelitian yaitu tentang Partisipasi Masyarakat Dalam *Electronic Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo), dalam bab ini akan membahas tentang implementasi sistem *electronic voting* pada pemilihan kepala desa, partisipasi masyarakat dalam *Electronic Voting* pada pemilihan kepala desa dan apa saja yang menjadi kendala dalam *Electronic Voting* pada pemilihan kepala desa.

Implementasi Sistem *Electronic Voting* berlangsung pada saat pemilihan kepala desa serentak di jawa timur, yang khususnya di Kabupaten Sidoarjo, Badan pengkajian dan penerapan teknologi (BPPT) melakukan uji coba dengan verifikasi pemilih menggunakan E-KTP sebagai alat verifikasi pemilih lalu mendapatkan kartu token yang dibuat untuk mengaktifkan menu layar di monitor didalam bilik suara yang cukup hanya menggunakan jari pada layar sentuh monitor tanpa mencari paku untuk memilih.

Partisipasi masyarakat terkait sistem *Electronic Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa, di Desa Klantingsari yaitu antusias, tetapi antusias mereka dikarenakan adanya oleh pihak aktor elite yang memobilisasikan para calon pemilih, dan banyak keterlibatan aktor-aktor elite sehingga mengakibatkan pendoktrinan untuk masyarakat yang sangat luar biasa sehingga menimbulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan dalam pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting* dan juga butuh pembenahan yang sangat serius dalam penggunaan *Electronic Voting* biar tidak terjadi sistem error atupun hal-hal yang merugikan salah satu dari calon dan juga peran panitia disini adalah sangat penting.

problem yang terjadi dalam sistem *Electronic Voting* adalah banyaknya masyarakat yang tidak bisa menerima hasil dari pemilihan suara yang menggunakan alat *Electronic Voting* karena adanya suara yang selisih dari jumlah pemilih sama hasil pemilihan, yang mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di kantor kepala desa Klantingsari dan teror kerumah-rumah warga yang menjabat jadi panitia pemilihan yang menggunakan sistem *Electronic Voting.*

a. Implementasi *Electonic Voting* Pada Pemilihan Kepala Desa, di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian yang dilakukan mulai tanggal 17 april 2018 sampai dengan tanggal 8 juli 2018, peneliti telah banyak menemukan data, tentang implementasi electronic voting pada pemilihan kepala desa, aspek yang pertama dalam penulisan ini adalah mengetahui implementasi*Electronic Voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sehingga untuk bisa mengetahui dan menjawab semua rumusan masalah yang akan dibahas dan dianalisis dalam bab IV ini.

Electronic voting adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari *electronic voting* adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan *e-voting* Perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali.

E-voting menurut peneliti adalah pengambilan suara dengan menggunakan media elektronik atau perangkat elektronik, mendefinisikan sebagai sebuah perangkat pemberian suara secara elektronik sehingga memiliki kemampuan untuk mempercepat tabulasi data, menekan biaya pemilihan dan memiliki kontribusi untuk mencegah pemilih yang tidak berhak menyatakan bahwa prosedur standar yang harus dimiliki *e-voting* salah satunya adalah Mempercepat penghitungan suara, Hasil penghitungan suara lebih akurat, Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara, Menghemat biaya pengiriman kertas suara, Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat), Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS), Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa, Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara, Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur.

Diantaranya adalah Perangkat lunak aplikasi yang dipergunakan pada pemilihan kepala desa dengan menggunakan *Electronic Voting* adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangkat lunak hasil pengembangan dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT melalui Program Sistem Elektronik.[56] di DesaKlantingsari termasuk desa yang pertama di Kecamatan tarik untuk mencoba *Electronic Voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ini adalah sebuah apresiasi khusus dari pemerintahan sidoarjo untuk desa Klantingsari, namun alasan kenapa desa Klantingsari ini bisa terpilih menjadi desa pertama dari Kecamatan tarik yang akan dijelaskan oleh ketua BPD sebagai wawancara berikut.

> *"...Yang jelas disini kita nggak mengajukan dari penilaian pemerintah sidoarjo sendiri proses penjaringannya kita ngga tahu sampai kok dapat Electronic Voting cuman mereka bilang itu sebuah salah satu bentuk apresiasi pemerintah sidoarjo ke desa Klantingsari karena ada beberapa kegiatan yaitu dengan lomba kita pernah jadi juara satu disidoarjo lombah kebersihan ada beberapa prestasi termasuk pengolalaan secara administrasi desa ada penilaian tersendiri mungkin dari situ kita bisa terpilih untuk menggunakan sistem Electronic Voting pada pemilihan kepala desa."*[57]

Dalam proses *Electronic Voting* ini telah diimplementasikan 2 jenis perangkat lunak yang berbeda dalam hal cara penampilan kertas suara elektronik. Dua jenis perangkat ini adalah :

1. Perangkat lunak dengan aktivasi menggunakan tombol.

[56]Retno Wulansuci. "Perancangan Alat E-voting Untuk Pemilihan Umum" Jurnal Teknik Komunikasi, Vol.3 No.2 Malang 3 februari, 2018.
[57] Bakhtiar, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perangkat lunak dengan aktivasi menggunakan *smart card* (kartu pintar)

Kedua jenis perangkat lunak yang dipergunakan pada prinsipnya memiliki fitur-fitur yang sama, perbedaannya hanya terletak pada mode aktivasi sistem yang selanjutnya menampilkan surat suara elektronik. Jika aktivasi menggunakan *smartcard*, maka pemilih akan diberikan smartcard untuk dapat digunakan dalam melakukan aktivasi menampilkan surat suara elektronik.[58]

Sedangkan untuk aktivasi menggunakan tombol, pada saat pemilih di bilik suara, petugas akan menekan tombol aktivasi yang berasal dari input keyboard dan perangkat *Electronic Voting* akan menampilkan pilihan calon dalam surat suara elektronik Namun yang diterapkan di DesaKlantingsari yaitu dengan menggunakan perangkat lunak yang ke 2 yaitu dengan mengunkanan *smart card* adapun proses penggunaan sistem *Electronic Voting* ini ini seperti diungkapkan oleh panitia pelaksanaan dalam wawancara berikut:

> *"...Orang datang absen duduk dipanggil sesuai ktp diberikan smart card dan kalau ada salah satu yang tidak bisa dan tidak paham tentang prosesnya terutama pemilih manula dikasi kesepakatan "bisa dibantu" yang disepakati oleh kedua calon dan dibantu oleh pihak petugas"*[59]

[58]Muhammad Kifli Hutagalung. "Perancangan Perangkat E-voting Berbasis E-KTP" Jurnal Saintikom, Vol. 11 No.48 Medan 3 februari, 2018.
[59]Khoirul anas, Wawancara, Sidoarjo, 16 mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengunaan *Electronic Voting*sejatinya untuk memudahkan masyarakat sehingga terciptanya efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, dengan dilaksanakan *Etronic Voting* idealnya mendapatkan beberapa manfaat seperti pengitungan yang lebih cepat, hasil pemungutan suara yang lebih akurat, menghemat biaya akomodasi dll.Selanjutnya, hasil perolehan suara dapat dicetak sebagai Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dengan ditandatangani oleh petugas dan para saksi di TPS yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya berikut yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo :

1. Komputer *Electronic Voting*

Komputer *Electronic Voting* digunakan untuk proses pemilhan awal yaitu dengan cara pemilih harus menunjukkan E-KTP kepada petugas di TPS. Dan tahap ini merupakan bagian dari verifikasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).Jika hasil verifikasi itu membuktikan bahwa pemilih berhak ikut dalam pemungutan suara, maka ia akan mendapat kartu token pemilih (*smart card*). Kartu itu dilengkapi dengan cip untuk memastikan bahwa pemilih berhak hanya sekali mengikuti pemungutan suara. Tidak akan ada suara yang ganda. Dan di desa Klantingsari ada 4 komputer dan 1 server untuk absensi proses awal pemilihan kepala desa yang menggunakan *Electronic Voting* sehingga memperlambat proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan karena ada 6 bilik suara didalam KPU.[60] Hal ini seperti diungkapkan oleh perangkat desa dalam wawancara berikut:

> *"...kemarin ada 4 komputer dan cuman 1 server yang digunakan untuk absensi daftar pemilih yang prosesnya dengan cara menunjukkan E-KTP yang dimasukan oleh alat pembaca KTP tersebut, sedangkan didalam bilik suara ada 6 bilik karena itu memperlambat proses kami untuk proses Electronic Voting seharusnya ada 6 komputer untuk absensi dan 6 bilik suara sehingga bisa seimbang"*[61]

Dari pernyataan diatas bisa dilihat bahwa kendala yang dihadapi oleh petugas pemungutan suara adalah masih kurangnya perangkat untuk ferivikasi data mengakibatkan sedikit terhambat mengingat ada 6 bilik suara.

2. Print untuk mencetak Kertas struk

Kertas struk tersebut memang penting. Isinya terdiri dari nama pemilih, nomor urut dan barcode yang berisikan data pilihan yang sudah dienkripsi. Kertas struk tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang diberi nama Kotak Audit. Kotak itu hanya dibuka jika ada gugatan atau kejanggalan yang membutuhkan penghitungan ulang.Dengan data yang terdapat di kertas struk itu, proses penghitungan ulang akan lebih praktis dengan memindai barcode yang terdapat di struk tersebut. Kotak audit menjadi bagian dari penerapan azas jujur dalam Pemilu.[62]

---

[60] Ibid.,73.
[61] Supraptono, Wawancara, Sidoarjo, 16 mei 2018
[62]Nani Purwati, "Perancangan Sistem E-Voting untuk pemilihan kepala daerah" *Journal*, (2015), 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Partisipasi masyarakat dalam sistem *Electronic Voting*

Partisipasi masyarakat dalam sistem *Electronic Voting* pada pemilihan kepala desa. Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan *Electronic Voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Yang meggunakan teori partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan.[63]Sesuai dengan tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam *Electronic Voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Klantingsari dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan *Electronic Voting* di Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, maka peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang terpilih terkait penerapan Electronic Voting yaitu, Perangkat Desa, Bapermas, BPD, Ketua PPK, Sekertariat Teknis, Tokoh Masyarakat, Tokoh perempuan dan tokoh pemuda yang ada diKlantingsari.

Partisipasi politik, sebagai suatu aktivitas, tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-

[63]Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rinerka Cipta, 1990), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Ada yang menyoroti faktor-faktor dari dalam diri seseorang, ada yang menyoroti faktor-faktor dari luar dan ada yang menggabungkannya namun dalam melihat partisipasi politik masyarakat yang menggunakan sistem *Electronic Voting* untuk pemilihan kepala desa untuk meningkatkannya harus melewati unsur-unsur yang jelas karena sistem *Electronic Voting* adalah proses yang baru diKlantingsari. Dan yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya. Dan tingkat partisipasi politik untuk pemilihan yang menggunakan sistem *Electronic Voting* ini berjalan dengan maksimal dari pada pemilihan yang menggunakan sistem manual seperti yang dipaparkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1

Pemilihan umum sistem *Electronic Voting* tahun 2018

Jumlah DPT	3.121
Jumlah pemilih	2.724

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah tidak memilih	397

Sumber : wawancara supratono kasi perencanaan

Tabel 4.2

Pemilihan umum sistem manual tahun 2013

Jumlah DPT	2.997
Jumlah pemilih	2.411
jumlah tidak memilih	586

Sumber : wawancara supratono kasi perencanaan

Dari tabel diatas bisa di jelaskan bahwasanya tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan sistem *Electronic Voting* lebih banyak dari pada menggunakan sistem coblos manual. Hal ini seperti diungkapkan oleh toko pemuda di DesaKlantingsari dalam wawancara berikut.

> *"partisipasi masyarakat Klantingsari dalam sistem Electronic Voting kemarin, mungkin karena anjurannya sudah disuruh untu melakukan Electronic Voting ya... masyarakat lumayan banyak sih yang ikut memilih dengan sistem Electronic Voting mungkin haampir 80% yang meilih dibanding pemilihan yang menggunakan sistem coblos yang hanya mencapai 70% saja.*[64]

Dan juga di ungkapkan oleh perangkat desa di DesaKlantingsari dalam wawancara berikut.

> *"masyarakat sangat antusias karena masyarakat sangat penasaran dan pingin mencoba dalam menggunakan hak pilih mereka mengguna Electronic Voting juga bisa dibuktikan pada waktu pemilihan hari H di TPS mereka sampai berdesak-desakan*

[64] An nisaa nabilah, Wawancara, Sidoarjo, 16 mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunggu antrian untuk memilih calon kandidat kepala desa yang mereka pilih"[65]

Dari kedua wawancara diatas bisa dilihat bahwa masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang cukup baik menyambut pelaksanaan *Electronic Voting* dengan indicator tingkat kehadadiran serta realita di masyarakat yang rela antre untuk memberikan hak suara mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa salah satu factor yang mempengaruhi perilaku politik adalah lingkungan sosial politik tidak langsung kenapa demikian karena system politik mendorong masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya.Dalam kehidupan masyarakat kita selalu ada perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindari. Demikian juga dalam bidang politik tentunya masing-masing individu memiliki pola pikir dan pola pandang yang berbeda-beda dalam melihat persoalan. Calon pemilih dengan menggunakan sistem *Electronic Voting* adalah sesuatu hal yang baru untuk masyarakat desa Klantingsari. Seperti yang diungkapan oleh perangkat desa dalam wawancara sebagai berikut.

"...harus sosialisasi yang lebih lama untuk pengenalan kepada masyarakat, sosialisasi yang diperlukan untuk masyarakat adalah berupa percobaan menggunakan alat tersebut bukan hanya pemutaran video saja, apalagi pemilih yang bisa dibilang lanjut usia seharusnya mereka dikasih tim khusus untuk melatih mereka."[66]

Mereka belum sepenuhnya mengetahui apa itu sistem *Electronic Voting* meskipun mereka sudah mengikuti sosialisasi mereka belum

[65] Supraptono, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018
[66]Bashori, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya secara sadar dan mandiri melakukan kegiatan politiknya. Masyarakat desa Klantingsari mengikuti pemilihan dengan sistem *Electronic Voting* karena mendapat undangan dari pihak desa. Selain itu pemilih melakukan pemberian suara hanya bertujuan untuk memilih saja karena mereka tidak mau orang yang mereka anggap baik dan pantas untuk menjadi calon kepala desa itu kalah dalam perolehan suara. Hal ini seperti diungkapkan oleh pemilih lansia dalam wawancara berikut.

> *"saya melakukan proses pemilihan suara karena saya hanya ingin langsung berpartisipasi dalam mensusken pemilihan umum, sehingga saya bisa langsung memilih calon kepala desa yang saya inginkan, meskipun didalam TPS saya sangat kebingungan dalam proses Electronic Voting, dan saya tidak mau ketinggalan karena ini untuk desa saya kedepannya"*[67]

Dari ungkapan wawancara diatas dijelaskan bahwa masyarakat desa Klantingsari sangatlah penasaran dalam menggunakan sesuatu yang baru namun harus ada proses klarifikasi dalam persiapan alat tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan teknis dalam proses pemilihan tersebut.Kesadaran politik desa klantigsari menjadi faktor determinan dalam partisipasi masyarakat artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yan berkaitan dengan linkungan masyarakat dan dengan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Begitu juga dengan pemilih pemula yang menggunakan sistem*Electronic Voting*. Hal ini seperti diungkapkan masyarakat dalam wawancara berikut.

[67] Hartini, Wawancara, Sidoarjo, 21 mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"...Mereka memang belum tahu betul tentang sistem Electronic Voting dan ada 2 RT yang tidak mau ikut sosialisasi namun sosialisasi tersebut masih tetap berjalan"[68]

Dari penjelasan diatas mereka memang menolak dengan diadakannya *Electronic Voting* di DesaKlantingsari namun pada 10 bulan sebelum pemilihan sudah disepakati kalau pemilihan kepala desa sudah memilih *Electronic Voting* untuk pemilihan kepala desa dan disitu sudah jelas benar-benar disepakati oleh masyarakat desa Klantingsari.

Dari sini peneliti berusaha menggali informasi dari beberapa responden dan informan tentang faktor yang mempengaruhi, penghambat dan pendorong partisipasi politik pemilih dalam menggunakan sistem *Electronic Voting* di Desa Klatingsari Kecamatan tarik Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang diungkapkan oleh Samuel P Huntington bahwa yang mempengaruhi, menghambat dalam partisipasi politik adalah kesibukan sehari-hari melalui pekerjaan, faktor pendidikan dan juga perasaan tidak mampu.[69]Kesibukan sehari-hari yang memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan Perlu kita ketahui bersama bahwa kelompok pemilih yang berentang usia 17-21 tahun yang berada di Desa Klantingsari ini banyak yang terangkum dalam kalangan pelajar, mahasiswa dan kerja muda. Peranan pemilih yang sangat komplek dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pribadinya selalu

[68] Siswanto, Wawancara, Sidoarjo, 16 mei 2018
[69]Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 102-103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilihan umum.Mereka lebih memiih utuk melaksanakan kegiatan mereka dari pada harus ikut serta dalam urusan pemilu.

Pertama adalah hal Pekerjaan, pekerjaan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupanmanusia, oleh sebab itulah faktor pekerjaan menjadi target penelitidalam mencari hasil penelitian yang dilakukan, karena pekerjaanpekerjaantertentu sangat mempengaruhi masyarakat dalamberpartisipasi. Para pemilih yang bekerja di luar lembaga-lembagapemerintah atau tidak berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintahberbeda dengan pemilih yang bekerja dilembaga yang berhubunganlangsung dengan kebijakan pemerintah, sebab mereka yang bekerja dilembaga pemerintah lebih cendrung tinggi tingkat kehadirannya dalampemilu.Biasanya para pegawai negeri tingkat kehadiran mereka lebihtinggi di karenakan mereka sering langsung berhubungan dengankebijakan pemerintah.

Kedua faktor pendidikan, faktor pendidikan juga ikut mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat Desa Klantingsari karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat informasi seseorang mengenai dunia politik dan persoalan-persoalan sosial yang terjadi ditempatnya.Selain itu juga semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan seseorang dalam berpolitik.Desa Klantingsari yang tingkat pendidikannya mayoritas lulusan SMA, dan yang untuk melanjutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejenjang perguruan tinggi sangat berat sekali yang dikarena faktor sosial ekonomi.Faktor Pendidikan menjadi salah satu penyebab lemahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa.

Tabel 4.3

Pendidikan desa klantingsari

No	Keterangan	Jumlah
1.	Tamat sekolah SD	0
2.	Tamat sekolah SMP	143
3.	Tamat sekolah SMA	1014
4.	Tamat D-3	28
5.	Tamat S-1	127
6.	Tamat S-2	24

Sumber : wawancara supratono kasi perencanaan

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwasanya tingkat pendidikan desa klantingsari ini adalah mayoritas berpendidikan SMA, tingkat kesadaran politik masih pasif dalam menentukan proses pemilihan sehingga bisa dapat mempengaruhi keputusan pemilihan. Seperti yang diungkapkan oleh perangkat desa dalam wawancara sebagai berikut.

> *"...Menurut saya Tingkat Pendidikanjuga menjadi faktor partisipasi masyarakat Klantingsari mengurang,karena dengan pendidikan yang kurang maka masyarakat pasti acuhtak acuh dengan politik, dan bagi yang memiliki pendidikanmeskipun tidak begitu tinggi tetapi sedikit banyak pasti adamemikirkan masa depan daerah nya yaitu dengan ikut serta memilihpemimpin di Desanya".*[70]

dapat dilihat dari tingkat pendidikan di Desa Klantingsari bahwa benar tingkat pendidikanmasyarakat desa Klantingsari ini memang sangat

[70]Supraptono, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpengaruh dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting*. Namun bukan hanya dari faktor pendidikan saja yang mempengaruhi dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanan pemilhan kepala desa.

Ketiga perasaan tidak mampu, perasaan tidak mampu keikut sertaan pemilih yang menggunakan sesuatu yang baru yaitu menggunakan sistem *Electronic Voting* itu tidak hal yang mudah bagi orang-orang yang sudah lanjut usia mereka sangat-sangat bingung untuk menjalankan pelaksanaan pemilihan sehingga banyak masyarakat desa Klantingsari yang mayoritas dari kaum yang sudah lanjut usia tidak mengikuti dalam proses pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting*. masyarakat desa Klantingsari yang terutama seorang lensia mereka lebih memilih tidak ikut dalam pemilihan karena merasa tidak mampu dalam pemilihan yang mengunakan sistem *Electronic Voting.*

Faktor Politik adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhikegiatan masyarakat atau yang disebut juga partisipasi politik.Prilakupolitik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawabmembuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, perilakupolitik masyarakat (individu/kelompok) yang berhak mempengaruhilembaga dan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan, karenamenyangkut kehidupan masyarakat.Adapun faktor-faktor politik meliputi.Pengetahuan masyarakat dapat menentukan keputusan yangakan diambil dalam proses partisipasi politik, sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

contoh pada saatpemilihan kepala desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting* banyak nya masyarakat yang ikut serta dalam proses pemilihan, namun partisipasi mereka itu partispasi yang kolektif yang konvensional Partisipasi ini dilakukan melalui sarana tidak resmi dan dalam bentuk tidak normal, kenapa bisa dibilang tidak normal karena masyarakat desa Klantingsari cenderung dimobilisasikan oleh pihak-pihak aktor elite, padahal jika difikirkan bahwa pemilihan kepala desa itumerupakan pemilihan yang secara langsung untuk bekerja di hadapanmereka atau masyarakat sendiri yang akan merasakan secara langsungbagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan di desanya, tetapipada kenyataannya banyak masyarakat yang kurang peduli dengandunia politik, hal ini dapat dilihat dari bagian sub indikatorsebelumnya yang sudah membahas pendidikan merupakan hal yangsangat mempengaruhi kurang optimalnya partisipasi politik di desa Klantingsari, ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat desaKlantingsari yang di bawah rata-rata. Untuk mengetahui pengetahuanmasyarakat akan poses pengambilan keputusan yang akan menentukankeputusan yang akan di ambil dalam pemilihan kepala desa Klantingsari, seperti yang diungkapkan oleh BPD desa Klantingsari dalam wawancara sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"...mengambil keputusan siapa yang akan dipilih pada saat pencoblosankarena apabila kurang dengan pengetahuan maka akan lebih mudahdipengaruhi oleh orang-orang lain".[71]

Dengan demikian sangat jelas sekali bahwa persepsi dari seluruhresponden yang diwawancarai menyatakan optimalnya partisipasipolitik itu bisa saja dikarenakan oleh faktor pengetahuanmasyarakatnya sendiri, dan yang terjadi di masyarakat desa Klantingsari ini pengetahuan yang dimiliki masih sangat minim dan masih banyak aktor-aktor elite yang terlibat proses pemilihan kepala desa mengakibatkan lemahnya partisipasi politik yang diberikan olehmasyarakat desa Klantingsari..

Faktor-faktor pendorong partisipasi politik pemilih yang menggunakan sitem *Electronic Voting* di DesaKlantingsari salah satunya adalah Rasa ingin tahu Pemilih yang menggunakan sistem *elctronic voting* adalah sekelompok yang belum mempunyai pengalaman apa-apa dalam meggunakan *Electronic Voting* sehingga dijadikan buat pengalaman tersendiri bagi kelompok pemilih. Pengalaman yang sangat berharga ini dalam pesta demokrasi yang mulai berkembang di negri ini menjadikan kelompok pemilih ikut andil dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan langsung keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilu yang menggunakan

[71]Nanang Sulistiyo, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem *Electronic Voting*. Hal ini seperti diungkapkan oleh tokoh pemuda dalam wawancara berikut:

> *"...pada waktu itu saya sangat pengen tau proses Electronic Voting itu seperti apa, saya merasa bangga karena dimana desa-desa yang lain masih menggunakan sistem manual sedangkan di Desa saya sudah memakai alat komputer"*[72]

Menurut Samuel P Huntington kesadaran politik salah satu bentuknya adalah partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa.[73]Kesadaran pemilih dalam menggunakan sistem yang baru yaitu menggunakan sistem *Electronic Voting* di DesaKlantingsari dalam berpartisipasi untuk pemilihan kepala desa bahwa cukup baik karena mereka menganggap bahwa peran mereka untuk mensukseskan pemilihan kepala desa yang harus mereka lakukan karena mereka juga warga pribumi yang lahir dan besar di DesaKlantingsari. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh tokoh perempuan di DesaKlantingsari sebagai berikut.

> *"saya ikut serta dalam pesta demokrasi dalam menggunakan alat Electronic Voting, karena itu memang suatu keharusan bagi saya bukan karena menggunakan dengan alat baru saya*

[72] Alvin Mahsuni, Wawancara, Sidoarjo, 16 mei 2018

[73]Samuel P. Hungtington Dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rinerka Cipta, 1990), 12-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi namun itu bagi saya adalah suatu keharusan."[74]

Anggapan pemilih yang menggunakan sistem baru di DesaKlantingsari bahwa yang sudah cukup umur dan sudah terdaftar dan diberi undangan ke TPS adalah suatu keharusan.

Kesadaran politik di setiap individu sangat di perlukan, dimanadengan adanya kesadaran dari setiap diri masing-masing masyarakat makaakan tercipta kesadaran untuk berpartisipasi terhadap permasalahan yangada di lingkungan masyarakat maupun politik. seperti pada hal nya Negarademokratis yang sangat membutuhkan masyarakat dalam membantumenjalankan pemerintahan yang ada namun dalam kondisi dilapangan antusias masyarakat Klantingsari itu dikarenakan di mobilasasi oleh aktor-aktor politik diantaranya adalah keterlibatan mantan KPU sidoarjo dalam proses pemobilisasian dan dibantu oleh-oleh aktor-aktor yang mempunyai wewenang dalam desa Klantingsari, oleh sebab itu pada saat adanyapemilihan umum ataupun Pilkades yang menggunakan alat baru yaitu menggunakan sistem *Electronic Voting* di desa Klantingsari banyaknya masyarakat yangikut berpartisipasi pada saat pemilihan yang berlangsung Dengan demikian sangat jelas sekali bahwa persepsi dari seluruhresponden yang telah dilakukan wawancara langsung oleh penelitimengatakan kurang optimalnya partisipasi politik masyarakat itudikarenakan oleh faktor

[74]Sulistiya Ningsih, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran disetiap individu masyarakat yangharus ada dan adanya mobilisasi dari aktor elite dalam proses pemilihan kepala desa , dengan adanya kesadaran masing-masing masyarakat desa Klantingsari maka akan tercipta tingkat partisipasi yang tinggi, tetapipada realita nya tingkat partisipasi yang sangat kurang pada pilkades yanglalu maka sudah menggambarkan bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat desa Klantingsari masih sangat minim karena adanya pemobilisasian aktor elite dalam proses pemilihan kepala desa.

Tabel 4.4

Relevansi dengan teori partisipasi politik menurut samuel P. Huntington

Aktif	Masyarakat desa Klantingsari, antusias karena penasaran dan pengen mencoba dalam menggunakan hak pilih mereka dengan menggunakan sistem *Electronic Voting*dengan indikator tingkat kehadiran serta realita masyarakat yang rela antri untuk memberikan hak suara mereka.
	Masyarakat desa Klantingsari hanya ikut serta dalam melakukan partisipasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasif	mereka yang disuruh oleh pihak orang tua dan sejumlah oknum-oknum masyarakat dalam proses pemilihan yang menggunakan sistem *Electronic Voting*.
Individual	Masyarakat desa Klantingsari melakukan kegiatannya atas dasar rasa tanggung jawab dalam kehidupan politik.
Kolektif	Partisipasi masyarakat desa Klantinsari cenderung hanya di mobilisasikan oleh aktor-aktor elite sehingga mempengaruhi partisipasi mereka.
Pekerjaan	Mayoritas pekerjaan desa klantingsari adalah petani dan juga buruh tani tingkat pengetahuan mereka dalam urusan politik tergolong masih minim sehingga bisa mempengaruhi partisipasi mereka dan masyarakat desa klantingsari dari umur 17-25 tahun hal pekerjaan sangat mempengaruhi partisipasi mereka karena mereka masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	merintis karir.
Pendidikan	Mayoritas masyarakat desa klantingsari adalah lulusan SMA, bisa dikategorikan kalau pendidikan mereka minim menjadikan tingkat kesadaran mereka masih tergolong lemah karena semakin tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran mereka dalam dunia politik.
Perasaan tidak mampu	Kebanyakan warga masyarakat desa klantingsari yang tidak mengikuti proses pemilihan suara adalah warga yang tergolong tua, karena mereka merasa tidak mampu untuk melaksanakan proses pemilihan yang menggunakan sistem *Electronic Voting*meskipun mereka sudah mengikuti proses sosialisasi tetapi mereka tidak paham betul dalam proses *Electronic Voting*
	Pengetahuan masyarakat dapat menentukan keputusan yang diambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor Politik	dalam proses partisipasi politik, sehingga bisa mempengaruhi dan dipengaruhi, yang di mobilisasikan atau memobilisasi keputusan.

C. Kendala yang terjadi dalam *Electronic Voting* pada pemilihan kepala desa

pemilihan umum Kepala Desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting* yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 25 maret 2018 diwarnai aksi demo besar-besaran. Dalam setiap pelaksanaan Pemilihan kepala desa setiap calon yang kalah mempunyai waktu senggang untuk mengadukan kepada pihak yang berwenang apabila di dalam proses pelaksanaan Pemilihan kepala desa terdapat atau terjadi sesuatu hal yang merugikan salah satu pasang calon tersebut. Pengaduan dan gugatan itu merupakan hak penuh dari calon yang tengah bersaing dalam proses penyelenggaraan Pemilihan kepala desa . Demikian halnya yang dilakukan oleh salah satu calon kepala desa suherno widianto, membuat pengaduan atau gugatan ke pengadilan terkait permasalahan-permasalahan semasa proses pelaksanaan Pemilihan kepala desa yaitu dengan adanya suara yang selisih antara jumlah DPT dan hasil yang ga sinkron. Ralf Dahrendorf mengatakan dalam teori konflik nya itu ada banyak salah satunya kelompok semu atau sekumpulan orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menduduki posisi dengan kepentingan peran yang identik.[75]Kehidupan sosial dan politik masyarakat tidak terlepas dari adanya dua tokoh masyarakat yang berpengaruh dan disegani oleh masyarakat yang mengakibatkan, di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, yang kiranya telah merugikan mereka dalam proses pelaksanaan Pemilihan kepala desa, sehingga mereka kalah dari dengan jumlah suara 1.274 suara dengan 1.482 suara mereka tidak mempermaslahkan kekalahan mereka namun yang mereka tidak bisa terima adalah jumlah dan hasil DPT yang selisih 36 suara tersebut membuat mereka melakukan gugutan ke pengadilan dengan bukti-bukti yang telah dipersiapkan diajukanlah gugatan tersebut ke pengadilan negeri sidoarjo guna untuk ditindak lanjuti mengenai kebenaran bukti-bukti pelanggaran yang di lakukan oleh panitia tersebut seperti yang diungkapkan oleh sekertaris BPD dalam wawancara sebagai berikut.

> *"Tapi itu sebetulnya saya yakin ada orang-orang tertentu didalam kepanitiaan itu "ga jujur" yang bermain didalamnya itu terutama panitianya karena kalau mengikuti yang diterapkan oleh BPPT karena kami waktu itu dibuat smpling ko jadi kami peserta bimtek, memang clear jadi begitu selesai misalkan yo,, yang masuk 1 2 3 4 ... 1 gaikut anggep kartu suara kan ada 4 tapi ada yg ga datang yg datang hanya 3, absen kita Cuma 3.. ditombol salah satunya."*[76]

[75] Novri Susan, *pengantar Sosiologi Konflik*, (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, 2014),42.

[76]Nanang Sulistiyo, Sekertaris BPD, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat proses pemilihan yang di DesaKlantingsari salah satu permasalahan yang sangat fatal disini adalah sering keterlambatan kertas yang dibuat untuk ngeprint struk dalam pemilih, seharusnya ada panitia khusus yang menjaga alat tersebut sehingga pada waktu proses pemilihan berjalan biar ga terjadi kehabisan kertas print buat struk. Hal ini seperti diungkapkan oleh panitia dalam wawancara berikut:

> *"...sistem Electronic Voting kemarin error dikarenakan sering ketelatan untuk mengisi kertas print yang dibuat khusus untuk mencetak struk dalam pemilihan, saya sebagai tim IT disini meminta maaf karena keteledoran dari pihak panitia, karena persiapan kertas kami kemarin sempat habis, jadi waktu proses pemilihan ada sekitar."*[77]

Kendala yang terjadi bisa mengakibatan partisipasi dalam memilih akan cenderung pasif karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelengara pemilu, seperti yang diungkapan oleh Samuel P. Huntington juga mendefinisikan partisipasi masyarakat dibagi menjadi 2 macam yaitu partisipasi aktif dan pasif.Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi.Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif.[78]Dalam proses Pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya panitia pemilihan. Panitia pemilihan bersifat

[77] Mulyohadi, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

[78]Samuel P. Huntington dan Nelson dalam Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 368

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

independen dan tidak terikat dengan pemerintahan administrasi negara seperti pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan kabupaten. Panitia pemilihan bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa yang bersaing dalam proses pemilihan kepala desa. Panitia ini dibentuk atas pertimbangan kehendak masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan pemilihan kepala desa.

Dalam penentuan calon panitia pemilih dilakukan dengan melakukan musyawarah oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat desa melalui perwakilan yang ada dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD).[79]seperti yang diungkapkan oleh anggota BPD dalam wawancara sebagai berikut.

> *"BPD, LMD, RT dan RW atau unsur masyarakat yang lain PKK dan itu semua diundang waktu pemiihan ketua panitia... itu dipilih secara musyawarah dan mufakat jadi distu ada pilhan salah satunya orang yang pernah jabat jadi TPS, PPK dll dari pilihan itu ditawarkan bukan ditunjuk langsung dan itupun disepakati oleh kedua pihak calon."*[80]

Panitia pemilihan kepala desa KlantingsariKecamatan Tarik tahun 2018 yang dibentuk berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari komponen-komponen masyarakat desa, yakni : Unsur perangkat desa, Pengurus lembaga kemasyarakatan desa, Tokoh-tokoh masyarakat Panitia pemilihan yang terpilih kemudian dilaporkan kepada kepala daerah untuk

[79] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2017
[80]Nanang Sulistiyo, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disahkan dan dilantik oleh kepala daerah. Panitia yang telah disahkan dan dilantik oleh kepala daerah akan mendapatkan pelatihan pengarahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Biro Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Panitia Pemilihan Kepala Desa Klantingsari dibentuk pada tanggal 24 Desember 2017 dengan susunan sebagai berikut : Ketua Panitia : khoirul anas, Wakil Ketua : Mulyanto, Sekretaris : Mulyohadi, Bendahara Panitia : mustofa dimiyanti.

Terjadinya konflik kerusuhan pada pemilihan Kepala Desa yang menggunakan alat *electronic* di Desa KlantingsariKecamatan Tarik pada Pilkades serentak tanggal 25 Maret 2018 ditimbulkan oleh amukan massa tim pendukung calon yang kalah yaitu dari tim pendukung Suherno widianto dari Dusun bokongisor. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ralf Dahrendorf bahwa Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupansosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa adadalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandanganini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan danintegrasi yang senantiasa berlangsung.[81]

Di Desa Klantingsari sendiri kerusuhan dilakukan oleh sebagian pendukung Suherno Widiato yang diketahui kalah Pendukung yang sebelumnya emosi karena kekesalan terhadap perilaku dari pihak panitia ditambah dengan kekecewaan atas kekalahan calon yang didukung

[81]Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2014). Hal. 39-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian Massa dari Dusun Bokongisor yang dibantu oleh Dusun Klanting melampiaskan kekecewaan serta emosinya.karena masyarakat desa Klantingsari yang terutama di pihak pendukung calon yang kalah tersebut tidak bisa menerima kekalahannya karena hasil dari pemilihan yang menggunakan sistem *Electronic Voting* tersebut tidak sesuai dengan jumlah pemilih. Adanya rasa tidak puas dari hasil *Electronic Voting* terhadap hasil penghitungan yang selisih mencapai 36 suara yang warga masyarakat desa Klantingsari menyebut dengan suara hantu yang mengakibatkan konflik pada pemilihan umum kepala desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting*.Terjadinya kecurangan dalam pengelapan suara yang dilakukan oleh beberapa oknum birokrasi mengakibatkan proses pemilihan kepala desa dengan sistem Electronic Voting tidak berjalan efektif dan mengakibatkan sejumlah warga masyarakat melakukan demonstrasi, berikut yang dijelaskan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

> *"...respon masyarakat terkait terjadinya permasalahan itu sangat antusias kalau kemarin yang ricuh itu, sistem panitianya kemungkinan yang agak-agak gapaham sama sistem Electronic Voting, kemarinkan rumornya ada salah satu.. eh bukan salah satu se salah dua atau banyak sampe 36 kira-kira itu struknya tidak keluar jadi ditulis, kemungkinan 36 itu yang struk tidak keluar sama yang ditulis itu diakumulasikan 36x2 nah yang tidak*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa diterima oleh warga adalah yang jumlah 36 itu kok bisa muncul."[82]

Sebagian warga masyarakat menemukan tindakan kecurangan dalam sistem *Electronic Voting* tersebut yang dilakukan oleh elite oknum birokrasi, maka dari itu warga melakukan protes dan tindakan demo untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut.Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemilihan dengan sistem *Electronic Voting* masih bersifat dinamis dan menuai banyak masalah dikalangan warga masyarakat, hal tersebut menjadi topik pembicaran yang serius bagi para birokrasi pemerintahan maupun warga masyarakat KlantingsariKecamatan tarik kabupaten sidoarjo, saat ini proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yaitu mencari titik temu atau solusi untuk masalah tersebut, seperti yang dipaparkan oleh Tokoh perempuan dalam wawacara sebagai berikut.

"Nah untuk cara penyelesaian terjadinya konflik di Klantingsari saat ini belum menemukan titik terang karena berbagai macam penyelesaian sudah kami tempuh, nah insyaallah pada hari ini tepatnya pada hari senin pada tanggal 23 mei 2018 akan dilakukan mungkin mediasi atau mungkin bagaimana saya kurang tahu kepada pihak DPR sebagai penyalur aspirasi rakyat nanti kalau dari DPR sudah menemukan titik terang maka akan dilanjut kepihak bupati".[83]

[82]Alvin Mahsuni, Tokoh masyarakat, Wawancara, Sidoarjo, 16 mei 2018
[83] An Nisa Nabilah, Tokoh Perempuan, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konflik tersebut masih bersifat baku dan belum ada titik temu dari berbagai elmen yaitu masyarakat dan pemerintah, sehingga butuh waktu ekstra untuk menemukan solusi tersebut, DPR sebagai menyambung atau jembatan bagi masyarakat mempunyai tugas yang sangat penting untuk itu karena itu masyarakat berharap lebih kepada DPR untuk segera menemukan solusinya.Dengan adanya ketimpangan cacatnya pemilihan atau pungutan suara dengan menggunakan sistem Electronic Voting maka banyak pertanyaan dari para kalangan masyarakat terkait keakuratan atau efektifitas alat tersebut, sehingga banyak yang membandingkan dengan sistem pemilihan secara manual atau coblos,Melihat pendapat narasumber masyarakat desa Klantingsari bisa dikesimpulkan bahwasanya *Electronic Voting* ada dampak positif dan negatifnya, namun hal tersebut ada pertimbangannya masing-masing karena akan disesuaikan dengan kebutuhan dan lebih menghindari dari sifat kecurangan seperti yang diungkapkan oleh perangkat desa dalam wawancara sebagai berikut.

> *"Kan komputer itu bisa dibuat oleh manusia data-data dan pembuatan-pembuatan tersebut dibuat oleh manusia dan bisa dimanipulasi angkanya, nah bank-bank yang besar saja bisa di hack oleh manusia apalagi sistem Electronic Voting tersebut. Itu kan bisa jadi dimanipulasi juga kan data-datanya tapi kalau coblos manual itu kita datang trus nyoblos masuk ke bilik suara tanpa adanya bisa dimanipulasi datanya, kan langsung gitu meskipun hal itu dapat memperlama panitia dalam penghitungan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suara ya, bagaimana lagi kalau memang sistem tersebut lebih kami terima daripada sistem Electronic Voting."[84]

Pernyataan tersebut lebih condong banyaknya kekurangan dari *Electronic Voting* sehingga masyarakat lebih condong setuju dengan pemilihan sistem manual atau coblos, karena menurut sebagian masyarakat Klantingsari sistem pemilihan manual atau coblos lebih efektif dan lebih terhindar dari tindakan kecurangan yang akan dibuat oleh oknum-oknum tertentu yang berkepentingan di dalamnya.Munculnya sistem atau cara baru dalam sebuah demokrasi pasti ada pertimbangan baik dan buruknya, namun tugas dari pemerintah yaitu menjadikan sebuah hal yang lebih baik lagi, adanya *Electronic Voting* merupakan cara yang ampuh bagi sebagian masyarakat namun tidak bagi masyarakat Klantingsari, karena bagi sebagian masyarakat tersebut adanya *Electronic Voting* tidak cocok di terapkan di desa klantingsri, seperti yang dipaparkan oleh salah satu tokoh pemuda desa Klantingsari.

"...Mungkin sistem Electronic Voting itu sudah bagus karena Electronic Voting itu kemajuan dalam hal demokrasi tetapi ada baiknya untuk sistem Electronic Voting itu tidak dilaksanakan di desa Klantingsari karena kami sngat-sangat kecewa dari hasil kemarin, karena kami sudah istilahnya yakin betul, sudh berpositif thinking untuk sistem Electronic Voting itu berjalan dengan lancar tidak ada kendala sama sekali tetapi sistem Electronic Voting ternyata sangat menjadikan warga

[84]Supraptono, Perangkat desa, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Klantingsari itu kecewa, karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh bebepa oknum yang idak bertanggung jawab."[85]

Sebenarnya yang menjadi titik permasalahan yang ada di Klantingsari yaitu adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang memanfaatkan sistem pemilihan *Electronic Voting* tersebut, maka dari itu merunut sebagian warga *Electronic Voting* lebih gampang untuk melakukan tindkan kecurangan karena sifatnya benda dan bisa di kontrol oleh manusia itu sendiri. Salah satu kekurang juga bagi panitia tidak adanya sosialisasi secara continyu kepada warga setempat terkait *Electronic Voting* sendiri, hal tersebut mengakibatkan sebagian warga belum faham betul dengan cara pemilihan menggunakan sistem Electronic Voting , hal tersebut masih bersifat baru dan perlu pemahaman secara continyu, seperti yang dipaparkan oleh salah satu tokoh masyarakatKlantingsari dalam wawancara sebagai berikut.

"Sosialisasi tidak bisa dilakukan sekali harus dilakukan berkali-kali dan warga harus benar-benar tahu tentang pemilihan sistem dengan Electronic Voting tersebut, nah saran saya sich... kalau memang sistem itu dilaksanakan ya.. kami berharap untuk panitia dalam panitia sistem Electronic Voting harus benar-benar bersikap netral jadi tidak akan ada yang namanya doktrin-doktrin dalam salah satu calon dan juga untuk penyuluhan dilakukannya seharusnya dilakukan tidak sekali tetapi harus berkali-kali apalagi

[85]Wisnu, Tokoh Pemuda, Wawancara, Sidoarjo, 16 mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk masyaraakat yang sudah lansia yang tidak tahu pengaplikasian dalam komputer".[86]

Dari penjelasan diatas bahwa sosialisasi untuk sistem *Electronic Voting* dan pendidikan bagi warga masyarakat yang sudah wajib memilih sangat penting untuk dilakukan dan sosialisasi itu harus dilakukakan berkali-kali oleh panitia sampai pemilih itu benar-benar paham tentang - pemilihan yang menggunakan *Electronic Voting.* Masih belum efektifnya dalam waktu sosialisasi ini yang hanya menggunakan pemutaran video dalam sosialisasi seharusnya menggunakan alat yang digunakan dalam pemilihan yaitu alat *Electronic Voting* itu sendiri karena dari pihak BPPT sendiri sudah mengirim alat atersebut ke desa Klantingsari gunanya untuk sosialisasi ke masyarakat dan dalam pemutaran videopun seharusnya panitia memikirkan, dalam pemilihan kepala desa ini kan bukan hanya ada calon 1 yaitu ada calon nomor 2 seharusnya panitia disini bersifat adil dan netral sehingga tidak menciptakan dokrin-dokrin kemasyarakat yang masih terbilang awam dalam pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting* dan dari sini mengakibatkan awal mula konflik yang terjadi di desa Klantingsari. Seperti yang di ungkapkan oleh tokoh pemuda dalam wawancara sebagai berikut.

"...Dari situ menyebabkan Ada satu dusun yaitu bokongisor yang membubarkan pada saat sosialisasi tersebut karena mereka menganggap sosialisasi itu sudah tidak netral dan dia merasa

[86]Alvin Mahsuni, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka semua itu didoktrin oleh pemutaran film itu karena cuman 1 nomor yang dibuat contoh"[87]

Dusun bokongisor sendiri adalah dusun yang penduduknya lumayan banyak yaitu ada 959 DPT yang ada dibokingisor dari sini sosialisasi yang dilkasanakan oleh panitia sendiri bisa dibilang gagal karena dari sikap yang dilakukan oleh panitia yang tidak netral tersebut mengakibatkan mereka tidak bersosialisasi ke dusun bokongisor karena dari penduduk bokongisor sendiri adalah dusun salah satu calon kepala desa dari sini mengkibatkan singgungan yang dilakukan secara langsung oleh pihak panitia untuk calon kepala desa yang dengan nomor urut 2 tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh masyarakat dalam wawancara sebagai berikut.

> *"...saya rasa awal terjadinya permasalahan yang di DesaKlantingsari ini adalah sikap dari panitia yang gak netral dalam waktu sosialisasi pihak yang nomor urut 2 ini merasa tersinggung dan marah karena waktu sosialisasi ini mereka hanya menjelaskan contoh yang nomor urut 1 saja seharusnya mereka memikirkan calon yang lain soale dipemilihan ini bukan hanya ada calon 1 yaitu ada calon 2."*[88]

Menurut Ralf Dahrendorf dalam teori konflik bahwa Masyarakat dalam berkelompok dan hubungan sosial didasarkan atas dasar dominasi

[87]Wisnu, Tokoh Pemuda, Wawancara, Sidoarjo, 16 mei 2018
[88]Mulyohadi, Masyarakat, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menguasai orang atau kelompok yang tidak mendominasi.[89]Dan upaya pelestarian sistem politik dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan politik, antara lain sosialisai politik dan pendidikan politik. Kedua kegiatan komunikasi politik itu merupakan suatu proses dalam membentuk sikap dan perilaku para calon penerima sistem dan penerus sistem dimasa yang akan datang. Sosialisasi politik sering juga disamakan dengan pendidikan politik sebagai suatu aktivitas mempengaruhi, mengubah dan membentuk sikap dan perilaku berdasar nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia.Dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa konflik yang terjadi merupakan konflik horizontal karena pemilihan umum kepala desa konflik horizontal antar masyarakat pendukung pasangan calon.pemilihan umum Kepala desa yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 25 maret tahun 2018 yang diwarnai aksi kekerasan. Kejadian ini terjadi pada Pemilihan kepala desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 konflik ini memang bersifat horizontal karena ada keterlibatan aktor-aktor elite.[90]yaitu dalang dari permasalahan ini seperti yang diungkapkan oleh BPD dalam wawancara sebagai berikut.

> *"...adanya keterlibatan mantan KPU, premanisme dan aktor-aktor lain yang ada dendam pribadi kepada lurah wawan mereka*

[89]George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern edisi keenam, Jakarta : Prenada Media,2004), 153

[90]Kusnadi, Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja, (Malang : Taroda, 2002), hal. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memprovokasi warga sehingga warga menjadi brutal dan tidak bisa dikendalikan."[91]

kekerasan yang dilakukan pendukung calon akibat kalah dalam pemilihan yang menggunakan sistem *Electronic Voting*. Konflik terjadi akibat adanya jumlah suara yang selisih 36 suara dan kepanitiaan yang tidak begitu banyak mengetahui sistem *Electronic Voting* tersebut. Akibatnya terjadi dualisme dukungan yang diberikan kepada calon yang berbeda. Adanya rasa tidak puas terhadap hasil penghitungan yang selisih 36 suara warga pada saat itu yang terutama dari pihak dukungan bapak suherno widianto di kordinir oleh mantan KPU untuk demonstrasi kepada pihak panitia dan teror-teror kerumah warga yang menjabat jadi panitia dan ketua BPD salah satunya adalah dirumah bapak Bakhtiar beliau diambil dan diculik dari rumah untuk dihakimi warga. Demonstrasi itu dipimpin oleh salah satu aktor elite yaitu bapak nanang hariyanto yaitu salah satu mantan KPU sidoarjo. Pengalaman Pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem baru ini menunjukan bahwa ketika proses berjalannya dan penggunaan sistem tersebut tidak maksimal dan mengakibatkan banyaknya warga yang demonstrasi dan marah akibat tidak sesuainya jumlah dan hasil perolehan suara. Fenomena yang muncul dalam pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting* disini adalah pihak yang kalah yang mengalami kekalahan dengan angka selisih 208 suara dan adanya jumlah suara yang tidak sesuai yaitu selisihnya jumlah DPT sama hasil perolehan suara, dari pihak yang kalah

[91] Nanang sulistiyo, Sekertaris BPD, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memprovokasi warga dan adanya keterlibatan aktor-aktor elite yang tidak menginginkan pihak yang no.1 ini memenangkan dalam pemilihan kepala desa yang dikarenakan ada dendam pribadi kepada pihak calon no.1 dan dari keterlibatan aktor-aktor elite ini selalu mengangkat isu penggelembungan suara dan suara yang selisih 36 suara tersebut untuk memprovokasi warga, banyak warga yang terprovokasi persoalan terhadap pengakuan aktor elite ini untuk sebagai sumber utama kekalahan seperti yang diungkapkan oleh BPD dalam wawancara sebagai berikut.

> *"...Bayak orang yang sengaja bermain memanfaatkan situasi untuk tidak kebaikan karena provokator-provaktor dari mereka semua memang ada ketidak senangan terhadap kepala desa wawan."*[92]

Sesuai yang dipaparkan dalam teori konflik Dahrendraf,Dahrendrafmengatakan hal itu bersifat memisahkan.Alasan untuk itu adalah bahwa hal itu menimbulkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan peran yang diharapkan.Kekuasaan dan otoritas merupakan sumber-sumber yang menakutkan dan mereka yang memegangnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo.[93]Massa yang terprovokasi tersebut memprotes kepada pihak panitia untuk mempertanggung jawabkan suara yang selisih tersebut dan dimanfaatkan oleh tim sukses dari pihak calon yang kalah, Kejadian ini baru terjadi dalam Pemilihan kepala desa di desa KlantingsariKecamatan

[92]Supraptono, Anggota BPD, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018
[93]George Ritzer, , Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tarik, dimana pendukung bapak suherno widianto menuding adanya penggelembungan suara yang menganggap semuanya itu dilakukan oleh pihak panitiayang mengakibatkan Kerusuhan dan demonstrasi yang anarkis, sehingga banyak panitia dan tim BPD yang babak belur karena amukan warga yang di provokator oleh aktor elite tersebut itu menyebabkan banyak orang yang luka berat dan ringan. Kerusuhan juga mengakibatkan sejumlah bangunan yang rusak yaitu diantaranya adalah aula bangunan kantor pemerintahan desa, rumah-rumah panitia yang dicurigai curang terhadap pemilihan yang menggunakan sistem *Electronic Voting* dan juga rumah ketua BPD yang rusak parah karena mereka menganggap pemilihan panitia yang tidak becus dalam penggunaan alat *Electronic Voting* seperti yang diungkapkan oleh sekertaris BPD dalam wawancara sebagai berikut.

> *"...Banyak aset desa yang dirusak misalkan kayak mimbar alat peraga, meja dll, banyak rumah-rumah panitia yang dirusak, rumah BPD, bahkan ketua BPD dipukuli dirumahnya kayak mencontohkan seperti massa PKI karena dia jam satu malam diambil dari rumahnya diculik dan itu ada aparat."*[94]

Hal tersebuat menjadi pertimbangan yang serius bagi birokrasi pemerintahan desa dalam menerapkan sistem *Electronic Voting*, banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk menerapkan sistem *Electronic Voting* dalam sebuah pemungutan sura, tidak semerta merta hanya

[94]Nanang Sulistiyo, Sekertaris BPD, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

condong dalam satu arah saja yaitu lebih ke berpihakan dengan salah satu calon, namun harus bersifat demokrasi dan netral, dengan begitu akan terhindar dari permasalahan dan pertikaian.penyelesaian konflik pada Pilkades di Kecamatan tarik tepatnya di Desa Klantingsari menggunakan perantara, atau disebut dengan Mediasi. Dimana mediasi merupakan peleraian konflik melalui perantara yang disebut dengan pihak ketiga yang nantinya sebagai penghubung anatara kedua belah pihak yang bertikai seperti yang diungkapkan oleh perangkat desa dalam wawancara sebagai berikut.

> *"...Insya'allah pada hari ini tanggal 23 mei akan dilakukan mungkin mediasi atau mungkin bagaimana saya kurang tahu kepada pihak DPR sebagai penyalur aspirasi rakyat nanti kalau dari DPR sudah menemukan titik terang makan akan dilanjut ke pihak Bupati."*[95]

Mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah orang berkedudukan lebih tinggi sehingga mampu menjadi panutan. Untuk itu Kasat Reskrim Polres Sidoarjo dibantu dari polres pihak Tarik untuk diminta mediasi dan akan diputuskan oleh jaksa hakim didalam ruang pengadilan negeri sidoarjo. sebagai pihak ketiga dalam kerusuhan yang terjadi di Desa Klantingsari. Polres Sidoarjo dan Polsek Tarik diterjunkan untuk mengamankan jalannya pemilihan kepada Desa di Desa Klantingsari pengamanan sengaja dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam berlangsungnya pemilihan, namun kapolsek dan anggota TNI ini sangat kualahan pada saat amukan warga dalam hari

[95] Supraptono, Perangkat Desa, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H terjadi konflik-konflik tersebut seperti halnya yang diungkapkan oleh masyarakat dalam wawancara berikut.

> *"...pada awalnya tim keamanan dari kapolsek dan TNI ini dipanggil untuk mengamankan demonstrasi yang sangat anarkis ini mereka sangat kualahan untuk mencegah tindakan warga, karena banyaknya warga mungkin bisa ribuan warga yang menyerang balai desa di DesaKlantingsari."*[96]

seperti halnya yang terjadi pada pembakaran aset-aset desa dan pemukulan serta pengeroyokan terhadap ketua panitia dan ketua BPD serta anggota-anggotanya. Petugas dari Polres Sidoarjo dan Polsek Klantingsari sebagai pihak ketiga dalam melerai pertikaian tidak tersulut emosi dan berusaha dengan baik mengkondisikan masalah pada saat kejadian.

[96]Siswanto, Masyarakat, Wawancara, Sidoarjo, 16 Mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, Ada 3 aspek. implementasi *Electroic Voting* merupakan sebuah perangkat pemberian suara secara elektronik, sehingga memiliki kemampuan untuk mempercepat tabulasi data, menekan biaya pemilihan dan memiliki kontribusi untuk mencegah pemilih yang tidak berhak namun masih perlu banyak pembenahan dalam sistem tersebut karena masih sering terjadinya sistem yang error pada waktu pelaksanaan pemilihan yang berlangsung.

Partisipasi masyarakat terkait sistem *Electronic Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa, di Desa Klantingsari yaitu antusias, tetapi antusias mereka dikarenakan adanya oleh pihak aktor elite yang memobilisasikan para calon pemilih, dan banyak keterlibatan aktor-aktor elite sehingga mengakibatkan pendoktinan untuk masyarak yang sangat luar biasa sehingga menimbulkan permasalahan dalam pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting* dan juga butuh pembenahan yang sangat serius dalam penggunaan *Electronic Voting* biar tidak terjadi sistem error atupun hal-hal yang merugikan salah satu dari calon dan juga peran panitia.

problem yang terjadi dalam sistem *Electronic Voting* adalah banyaknya masyarakat yang tidak bisa menerima hasil dari pemilihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suara yang menggunakan alat *Electronic Voting* karena adanya suara yang selisih dari jumlah pemilih sama hasil pemilihan, yang mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di kantor kepala desa Klantingsari dan teror kerumah-rumah warga yang menjabat jadi panitia pemilihan yang menggunakan sistem *Electronic Voting*

B. Saran

Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

a. Seharusnya pemerintah daerah harus melakukan BIMTEK (Bimbingan Teknis) khusus kepada para panitia *Electronic Voting*, agar panitia faham betul terkait pemilihan melalui *Electronic Voting* dan sifatnya bersifat continyu sampai panitia tersebut faham betul cara mengoperasian *Electronic Voting* tersebut.
b. Panitia yang tersesun dalam kepanitian *Electronic Voting* seharunya para remaja-remaja desa bukan orang tua yang lanjut usia, agar pemilihan berjalan efektif dan sesuai tata aturan karena jika panitianya orang tua yang lanjut usia kebanyakan kurang faham terkait teknologi *Electronic Voting* karena berbasis komputer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Burhan Bungin. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

George Ritzer, dan Douglas J. Goodman. *Classical Sociological Theory.*McGraw-Hill, 2004.

George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1982.

Novri Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Prenadamedia Group, 2014.

Noeng Muhjair. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996.

Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007.

Samuel P. Huntington, dan Joan Nelson. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Selo Soemardjan., *Masyarakat dan Kebudayaan*. Djambatan: Penerbit, 1998.

Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D cetakan XXI*. Bandung: Alfabet, 2014.

Sudijono Sastroatmodjo. *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber jurnal :

Ardiyanti H. *Uji Coba E-Verivikasi dan Masa Depan Pemilu Elektronik 2019*, Jurnal Tidak di Terbitkan, Vol.8 No.15 (Agustus, 2016).

Fatkhan Masruri. *Pemilihan kepala desa di kecamatan buluspesantren kabupaten kebumen ditinjau dari pasal 46 ayat (2) PP. No. 72*, Skripsi, (skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Heru Setiyawan. *Rancang Bangun Sistem Informasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis Web (E-Pilkades)*, (Skripsi Tidak di Terbitkan, Fakultas Teknik Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri, 2016).

Indra, P dkk. *Rancang Bangun Sistem Pilkades Menggunakan Teknologi Smart Card Sebagai Kartu Pemilih,* Jurnal Lontar Komputer. Vol.7 No.2 Agustus, 2016.

Kusnadi.*Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja.* Malang : Taroda, 2002.

Muhammad Kifli Hutagalung. *Perancangan Perangkat E-voting Berbasis E-KTP.* Jurnal Saintikom, Vol. 11 No.48 Medan 3 februari, 2018.

Nani Purwati, *"Perancangan Sistem E-Voting untuk pemilihan kepala daerah*" *Journal*, 2015.

Ofilus Kuhon. *"Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa (suatu studi di desa toenselama kecamatan tondano utara)".* Peneliti Desa Mahasiswa Program Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013.

Retno Wulansuci. *"Perancangan Alat E-voting Untuk Pemilihan Umum"* Jurnal Teknik Komunikasi. Vol.3 No.2 Malang 3 februari, 2018.

SatyaMahardika."*ImplementasiKebijakanElectronic Voting (E-Voting) DalamPemilihanKepalaDesa di KabupatenBoyolali".Jurnal Politic and Government Studies,*Vol.6No.2, Juni, 2017.

Sulastri, dan Leni Natalia Zulita. "*E-Votting Pemilihan Walikota Bengkulu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu*",Jurnal Media Infotama, Vol.11 No. 2 (September, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Website :

https://www.antaranews.com/berita/687934/pemilihan-kepala-desa-sidoarjo-gunakane-voting diakses pada tanggal 29-06-29-2018 pukul 09:45

sumber wawancara :

Wisnu, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 april 2018
An nisa anabillah, *Wawancara*, Sidoarjo, 19 april 2018
Supratono, *wawancara,*desaklantingsari, 14 mei 2018.
Wawan Setyo Budi, Wawancara, Sidoarjo, 21 mei 2018
Bakhtiar, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018
Khoirul anas, Wawancara, Sidoarjo, 16 mei 2018
Mulyohadi, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018
Nanang Sulistiyo, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018
Bashori, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018
Hartini, Wawancara, Sidoarjo, 21 mei 2018
Siswanto, Wawancara, Sidoarjo, 16 mei 2018
Alvin Mahsuni, Wawancara, Sidoarjo, 16 mei 2018
Sulistiya Ningsih, Wawancara, Sidoarjo, 05 juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id